



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022

PERBAIKAN



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyediaan instrumen pengukuran kinerja instansi pemerintah yang berkorelasi dengan pencapaian visi, misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dilakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017-2022.


Perubahan dilakukan dalam bentuk penyesuaian terhadap hasil review pelaksanaan Renstra yang mencakup:

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi.
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja.
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan.
5. Penyederhanaan kegiatan.

Demikian Perubahan Rencana Strategis ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan Program/Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, September 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Dr. Yan Megawandi, SH.,M.Si
Pembina Utama
NIP. 19640130 198811 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	I.1
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Landasan Hukum	I.2
1.3 Maksud dan Tujuan	I.3
1.4 Sistematika Penulisan	I.4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH.....	II.1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.1
2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.6
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II.8
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah	II.9
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH..	III.1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah.....	III.1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III.6
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III.9
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV.1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah.....	IV.1
A. Tujuan.....	IV.1
B. Sasaran	IV.2
C. Indikator dan Target Tujuan/Sasaran	IV.5
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	V. 1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI.1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII.1
BAB VIII PENUTUP	VIII. 1

DAFTAR DIAGRAM

No	Judul	Hal
2.1	Komposisi Pegawai dan Honorer Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.7
2.2	Tingkat Pendidikan Formal Pegawai dan Honorer Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.8

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
II.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon	II.6
II.2	Tingkat Pendidikan Formal Pegawai dan Honorer Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.7
II.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.10
III.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah	III.3
III.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat Daerah Terhadap Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah	III.9
IV.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Tahun(2017-2022)	IV.6
IV.2	Indikator dan Target Tujuan Renstra Setda Tahun 2017-2022	IV.11
V.1	Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V.4
VI.1	Rencana dan Program serta Pendanaan Tahun (2017-2022)	VI.4
VII.1	Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII.20
VII.2	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 sesuai dengan Renstra	VIII.24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah bagian dari proses kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu bahwa setiap Sekretariat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Sekretariat Daerah yang berpedoman pada RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam suatu proses perencanaan strategis organisasi untuk menentukan strategi, arah dan tujuan, serta mengambil keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki (termasuk modal dan sumber daya manusia) dalam rangka mencapai strategi dimaksud.

Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan. Penetapan petunjuk atau pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Tugas Pokok membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah serta pelayanan administratif.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, merupakan salah satu kewajiban pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas sesuai tupoksi Sekretariat Daerah, khususnya sebagai unsur penunjang

urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada misi kelima Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penguatan fungsi unsur penunjang pelayanan pemerintahan.

Penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 19 ayat (4) dimaksudkan pula sebagai instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Sekretariat Daerah/organisasi selama 5 (lima) tahun ke depan yang diterjemahkan ke dalam rencana program dan kegiatan dalam rangka mensinergikan dan menselaraskan kebijakan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih.

Mengingat Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017- 2022 serta memperhatikan kondisi dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan, maka hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman menjadi faktor akan selalu diperhitungkan. Dengan disusunnya Rencana Strategis ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Rencana Strategis ini selanjutnya menjadi acuan bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku aparatur penyelenggara pemerintah daerah sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E)
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang RPJMD (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 seri C)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, dimaksudkan untuk menjabarkan Perda tentang RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta

menjadikannya sebagai arah dan acuan bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku unsur penunjang tugas pimpinan daerah.

1.3.2. Tujuan

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 ini disusun dengan tujuan:

- a. Menjadi tolak ukur Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
- b. Menjamin keterkaitan perencanaan penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Menjadi pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menjelaskan latar belakang penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 serta kedudukan dan keterkaitannya dengan RPJMD dan dokumen lainnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Menguraikan tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Menggambarkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta kondisi organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Memberikan informasi dan penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur organisasi Sekretariat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Sekretariat Daerah.

2.2. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH

Memberikan gambaran umum tentang macam sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN SEKRETARIAT DAERAH

Menjelaskan secara umum tantangan dan peluang pengembangan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada lima tahun mendatang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Menjelaskan permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Mengemukakan tugas dan fungsi Sekretariat yang terkait dengan visi dan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian visi dan misinya.

3.3. TELAAHAN RENSTRA

Mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Merupakan isu-isu strategis yang menjadi perhatian Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah, serta strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah, serta strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menggambarkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Menjelaskan ringkasan Renstra dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengimplementasikan Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah mempunyai Tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan secara administratif. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah Provinsi.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
- c. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah Provinsi.
- d. Pelayanan Administratif dan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah.
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Guna mendukung tugas dan fungsi tersebut, secara struktural, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari : 1 (Satu) Sekretaris Daerah, 3 (Tiga) Asisten, 9 (sembilan) Kepala Biro dan 27 (dua puluh tujuh kepala bagian) serta 81 (delapan puluh satu kepala sub bagian).

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur dengan susunan Organisasi sebagai berikut:

- I. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 1. Biro Pemerintahan, membawahkan:
 - i. Bagian Administrasi Kewilayahan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengembangan Wilayah dan Batas Daerah.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Sub Bagian Administrasi Pertanahan.

- ii. Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
 - b. Sub Bagian Fasilitas Kepala Daerah dan Legislatif.
 - c. Sub Bagian Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan.
 - iii. Bagian Kerja Sama , terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Fasilitas Instansi Vertikal.
 - b. Sub Bagian Kerja sama Swasta dan Luar Negeri.
 - c. Sub Bagian Kerja sama Antar Daerah.
2. Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
- i. Bagian Fasilitas Kegamaan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha.
 - b. Sub Bagian Urusan Perhajian, Wakaf dan Zakat.
 - c. Sub Bagian Kelembagaan dan Bina Kerukunan Beragama.
 - ii. Bagian Pendidikan, Keluarga Berencana, Pemuda dan Pariwisata, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
 - c. Sub Bagian Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
 - iii. Bagian Sosial, Kesehatan dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kesehatan.
 - b. Sub Bagian Sosial
 - c. Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
3. Biro Hukum, membawahkan :
- i. Bagian Hukum Perundang-Undangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Peraturan Daerah
 - b. Sub Bagian Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur
 - c. Sub Bagian Naskah Hukum Lainnya

- ii. Bagian Pelayanan Hukum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Sengketa Hukum
 - b. Sub Bagian Bagian Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum
 - c. Sub Bagian Penyelesaian Hukum dan HAM
- iii. Bagian Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan Hukum
 - b. Sub Bagian Publikasi Informasi Hukum
 - c. Sub Bagian Tata Usaha

II. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

- 1. Biro Perekonomian, membawahkan :
 - i. Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Analisis Makro Ekonomi Sarana dan Perekonomian
 - b. Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
 - c. Sub Bagian Tata Usaha
 - ii. Bagian Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Ketahanan Pangan.
 - b. Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral
 - c. Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - iii. Bagian BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya
 - a. Sub Bagian Pariwisata dan Budaya
 - b. Sub Bagian BUMD
 - c. Sub Bagian Penanaman Modal
- 2. Biro Pembangunan, membawahkan :
 - i. Bagian Perencanaan dan Pengendalian, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Penyusunan Program Sekretariat Daerah
 - b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha

- ii. Bagian Monitoring dan Evaluasi APBD, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi APBD Wilayah I
 - b. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi APBD Wilayah II
 - c. Sub Bagian Evaluasi Kebijakan Pembangunan APBD
 - iii. Bagian Monitoring dan Evaluasi APBN
 - a. Sub Bagian Monev APBN Wilayah I
 - b. Sub Bagian Evaluasi Kebijakan Pembangunan APBN
 - c. Sub Bagian Monev APBN Wilayah II
- 3. Biro Layanan Pengadaan, membawahkan :
 - i. Bagian Data Informasi
 - a. Sub Bagian Pengelolaan Data dan Informasi
 - b. Sub Bagian Layanan Publik
 - c. Sub Bagian Tata Usaha
 - ii. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
 - a. Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
 - c. Sub Bagian Pencegahan dan Penanganan Pengaduan
 - iii. Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - a. Sub Bagian Sistem Pengadaan Secara Elektronik
 - b. Sub Bagian Registrasi dan Verifikasi
 - c. Sub Bagian Layanan dan Dukungan

III. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

- 1. Biro Organisasi, membawahkan :
 - i. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Analisis Organisasi
 - b. Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
 - c. Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan

- ii. Bagian Pengembangan Kinerja, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja
 - b. Sub Bagian Data Informasi dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
 - c. Sub Bagian Peningkatan Kinerja
 - iii. Bagian Tata Laksana, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan
 - b. Sub Bagian Tata Laksana Pelayanan Publik
 - c. Sub Bagian Tata Usaha
2. Biro Umum, membawahkan :
- i. Bagian Rumah Tangga, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Rumah Tangga
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan
 - ii. Bagian Perlengkapan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Pengandaan dan Pemeliharaan
 - c. Sub Bagian Inventarisasi dan Penyimpanan
 - iii. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Urusan Gaji
 - b. Sub Bagian Perjalanan Dinas
 - c. Sub Bagian Perbendaharaan
3. Biro Humas dan Protokol membawahkan :
- i. Bagian Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Sub Bagian Informasi Pemerintahan dan Umum
 - c. Sub Bagian Informasi Ekonomi, Pembangunan, dan Kesra
 - ii. Bagian Humas, Dokumentasi, Publikasi Media, dan IT
 - a. Sub Bagian Dokumentasi dan Audio Visual
 - b. Sub Bagian Publikasi Media Cetak
 - c. Sub Bagian Publikasi Media Elektronik dan IT

- iii. Bagian Protokol
 - a. Sub Bagian Undangan
 - b. Sub Bagian Acara
 - c. Sub Bagian Pelayanan Tamu

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

V. Staf Ahli

2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

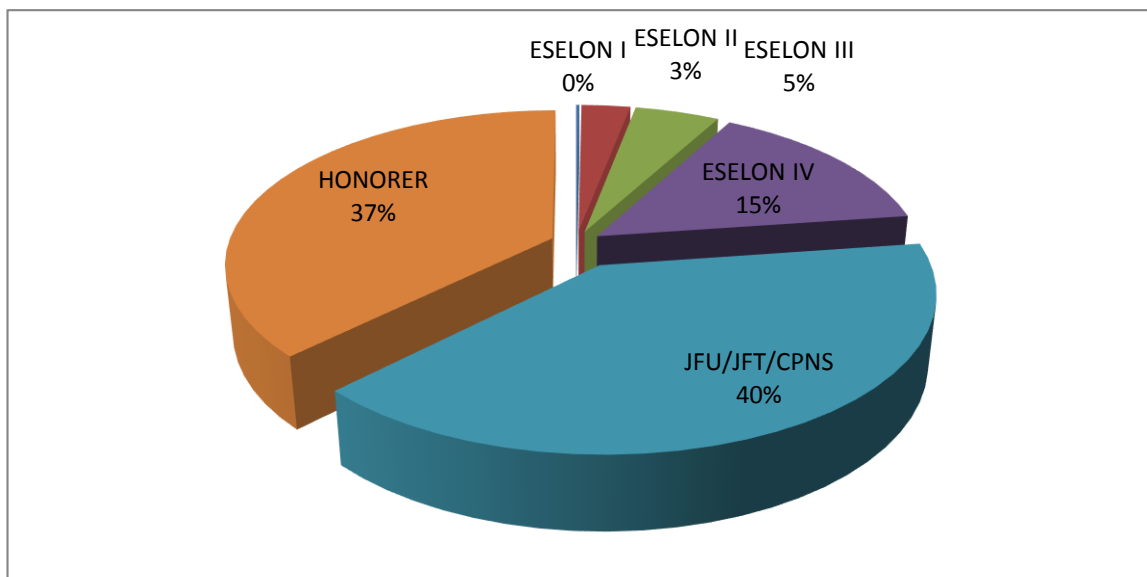
1. Komposisi Pegawai

Secara keseluruhan jumlah personil termasuk honorer di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 527 orang, untuk komposisi pegawai/honorer beserta tingkat pendidikan formal dapat dilihat pada Tabel dan Diagram berikut.

TABEL II.1
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN ESELON

NO	JABATAN	JUMLAH
1	ESELON I	1
2	ESELON II	15
3	ESELON III	26
4	ESELON IV	78
5	JFU/JFT/CPNS	210
6	HONORER	197
Total		527

DIAGRAM 2.1
KOMPOSISI PEGAWAI DAN HONORER SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



2. Tingkat Pendidikan Pegawai

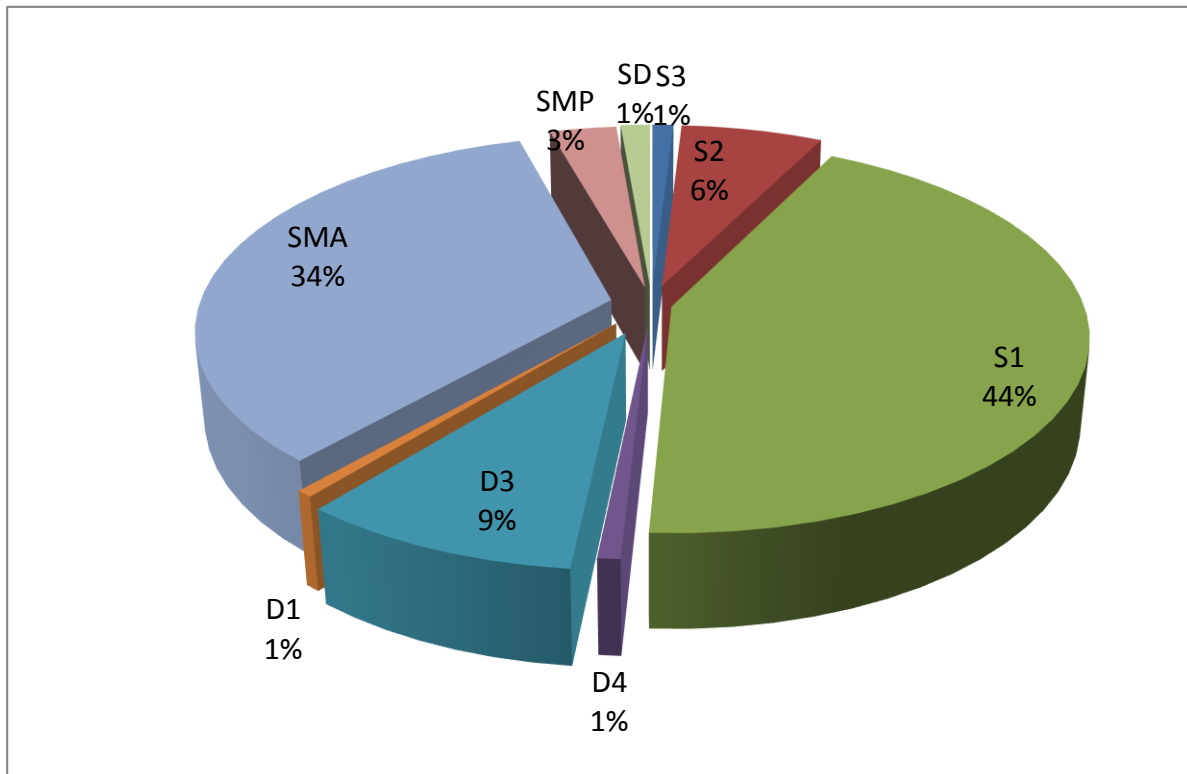
Tingkat pendidikan formal pegawai dan honorer di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL II.2
TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL PEGAWAI DAN HONORER
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S3	5
2	S2	34
3	S1	229
4	D4	4
5	D3	49
6	D1	3
7	SMA	180
8	SMP	16
9	SD	7
Total		527

DIAGRAM 2.2

**TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL PEGAWAI DAN HONORER SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan capaian kinerja PD yang diperoleh dari perbandingan antara capaian kinerja pelayanan PD dengan kinerja yang semula ditargetkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut.

Ketercapaian target berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun pada Sekretariat Daerah masing-masing Biro adalah Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pelaksanaan program pembangunan selama lima tahun (2012-2017) dapat dilihat pada tabel II.3

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berorientasi kepada pelayanan selaku unsur penunjang urusan pemerintahan terhadap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berkaitan dengan kegiatan tersebut diatas, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan sekretariat daerah. sebagai berikut :

Tantangan :

1. Lemahnya koordinasi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota;
2. Tingginya tuntutan masyarakat tentang pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Ketidak selarasan hubungan dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
4. Perbedaan persepsi para stake holder pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;
5. Belum optimalnya kerjasama;
6. Lemahnya perencanaan dan pengelolaan keuangan;
7. Kurangnya SDM yang profesional dan berkualitas;
8. Belum optimalnya pengelolaan makro dan mikro ekonomi

Peluang :

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung pelaksanaan pemerintahan Daerah;
2. Adanya dukungan yang besar dari Gubernur terhadap peran Sekretariat Daerah;
3. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Tingginya apresiasi perangkat daerah dan masyarakat terhadap kedudukan Sekretariat Daerah;
5. Tingginya dinamika sosial, ekonomi dan budaya daerah.
6. Tersedianya Jumlah SDM

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan dukungan kebijakan, dituntut untuk mampu berperan sebagai perangkat daerah yang mampu meningkatkan kualitas kebijakan pimpinan daerah, sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal, permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tata kelola administrasi pemerintahan dalam Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah, serta Penyelenggaraan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan lembaga atau instansi lainnya.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan kesejahteraan rakyat disebabkan kurangnya koordinasi perangkat daerah dengan masyarakat.
3. Penyelenggaraan dibidang peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum dan informasi hukum yang masih belum harmonis.
4. Pengendalian dan Penyelenggaraan makro dan mikro ekonomi yang belum optimal.
5. Belum optimalnya sistem pengendalian pembangunan, monitoring APBD dan APBN.
6. Belum optimalnya proses Pengadaan Barang dan Jasa yang transparan dan akuntabel.

7. Penyelenggaraan tata laksana, kelembagaan serta pengembangan kinerja ASN dan pemerintah daerah yang belum optimal.
8. Pelaksanaan pelayanan umum dan kesekretariatan yang belum optimal.
9. Belum optimalnya pelayanan dalam penyampaian informasi dan dokumentasi kepada publik.

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan , yaitu:

1. Mengoptimalkan tata kelola administrasi pemerintahan dalam Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah, serta Penyelenggaraan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan lembaga atau instansi lainya sehingga dapat mewujudkan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien.
2. Mengoptimalkan penyelenggaraan dan pelayanan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan peran perangkat daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
3. Mengoptimalkan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap rancangan produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan kepentingan umum.
4. Mengoptimalkan pengendalian dan Penyelenggaraan makro dan mikro ekonomi.
5. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui pengendalian pembangunan, monitoring serta evaluasi APBD dan APBN.
6. Mengoptimalkan proses pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa.
7. Mengoptimalkan penyelenggaraan tata laksana, kelembagaan serta pengembangan kinerja ASN dan pemerintah daerah
8. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan umum dan kesekretariatan.
9. Mengoptimalkan pelayanan dalam penyampaian informasi dan dokumentasi kepada publik.

Tabel III.1

PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

NO	BIRO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	BIRO PEMERINTAH	Belum optimalnya tata kelola administrasi pemerintahan dalam Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah, serta Penyelenggaraan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan lembaga atau instansi lainya	tata kelola administrasi pemerintahan, Kewilayahan belum baik	Kurangnya koordinasi Biro pemerintahan dengan Pemerintah Kabupaten Kota serta pemangku kepentingan terkait
			Kewenangan Provinsi, Kab/Kota masih tumpang tindih (overlapping)	Belum jelasnya regulasi di tingkat pusat
			Kerjasama yang belum maksimal	Belum jelasnya institusi yang menangani kerjasama pemerintah provinsi dengan pemangku kepentingan

2	BIRO KESRA	Belum optimalnya pelayanan kesejahteraan rakyat	Masyarakat kurang mendapatkan informasi	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
			Kualitas Kebijakan rendah	kurangnya koordinasi Biro Kesra dengan Perangkat Daerah
3	BIRO HUKUM	Penyelenggaraan dibidang peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum dan informasi hukum yang masih belum harmonis	Masih terdapat inkonsistensi peraturan perundang-undangan	Dinamika perubahan regulasi dari pemerintah yang cepat
			Substansi hukum tidak diketahui masyarakat	Kurangnya penyampain informasi hukum kepada masyarakat
4	BIRO PEREKONOMIAN	Pengendalian dan Penyelenggaraan makro dan mikro ekonomi yang belum optimal	Tata kelola perekonomian daerah belum maksimal	Kurangnya regulasi yang mendukung peningkatan pendapatan daerah
5	BIRO PEMBANGUNAN	Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan administrasi pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Pelaksanaan pembangunan terhambat	Serapan realisasi anggaran tidak tepat waktu

			Data serapan anggaran belum bisa diketahui secara cepat	Belum adanya sistem pengendalian yang cepat dan akurat
6	BIRO LAYANAN PENGADAAN	Belum optimalnya proses Pengadaan Barang dan Jasa yang transparan dan akuntabel	Pelaksanaan pengadaan barang jasa tidak tepat waktu, tidak hemat biaya, dan tidak berkualitas	kurangnya kematangan kinerja pengadaan barang/jasa yang memenuhi kriteria timeless (tepat waktu), cost saving (Penghematan biaya), kriteria Quality (kualitas baik)
7	BIRO ORGANISASI	Penyelenggaraan tata laksana, kelembagaan serta pengembangan kinerja ASN dan pemerintah daerah yang belum optimal	Pola kerja antar perangkat daerah kurang sistematis	Kurangnya penataan ketatalaksanaan perangkat daerah
			Organisasi perangkat daerah tidak bisa merespon perubahan sesuai dengan tuntutan peran maksimal pemerintah provinsi dalam pembangunan	Kurangnya penataan kelembagaan perangkat daerah

			Masyarakat kurang respon terhadap proses pembangunan	Kurangnya kualitas pelayanan publik
8	BIRO UMUM	Pelaksanaan pelayanan umum dan kesekretariatan yang belum optimal	Kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan terhambat	Kurangnya sarana prasana pendukung penyelenggaraan pemerintahan
9	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	Belum optimalnya pelayanan dalam penyampaian informasi dan dokumentasi kepada publik	Masyarakat tidak mengetahui informasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan	Kurangnya transparansi penyampain informasi publik

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mencakup pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RJPMD 2017-2022. Rencana Strategis Tahun 2017-2022 Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan prinsip-prinsip untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai visi dan misi yang ditetapkan dalam RJPMD 2017-2022. Di dalam upaya mendukung visi dan misi tersebut, terdapat faktor-faktor penghambat antara lain dimungkinkan adanya unsur tekanan politis dan kepentingan golongan atau individu di dalam visi dan misi yang ditetapkan.

Adapun visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagaimana dimaksud adalah:

Visi:

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Misi:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah
2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas
3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup

Visi, misi, tujuan dan sasaran serta program kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Mengacu Visi, Misi tersebut diatas, sebagai bentuk nyata untuk mendukung ketercapaian Visi, misi, maka Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berperan utama melalui misi ke-5 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi” Untuk mengimplementasikan visi dan misi yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan tugas dan fungsinya menetapkan program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan
2. Program Pengembangan Otonomi Daerah
3. Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah
4. Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan

5. Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB dan Pemuda
6. Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7. Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan
8. Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah
9. Program Pengembangan Dokumentasi Hukum Dan Informasi Hukum
10. Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian
11. Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam
12. Program Peningkatan Koordinasi BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya
13. Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Apbd
14. Program Perencanaan Setda
15. Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Apbn
16. Program Pengendalian Pembangunan Daerah Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan
17. Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
18. Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
19. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah
20. Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisis Jabatan
21. Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah
22. Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah
23. Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi
24. Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media dan IT
25. Program Peningkatan Pelayanan Protokoler

3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah adalah suatu keadaan yang perlu diatasi dengan memperhatikan peluang dan tantangan yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Adapun isu strategis tersebut dapat dilihat pada tabel III.2

Tabel III.2

**FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN SEKRETARIAT
DAERAH
TERHADAP PENCAPAIAN VISI MISI KEPALA DAERAH**

MISI	PERMASALAHAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan Demokrasi	Belum optimalnya tata kelola administrasi pemerintahan dalam Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah, serta Penyelenggaraan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan lembaga atau instansi lainnya	tata kelola administrasi pemerintahan, Kewilayahan belum baik	Adanya upaya Menciptakan sinergitas diantara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik
	Belum optimalnya pelayanan kesejahteraan rakyat	Kualitas Kebijakan rendah	Adanya tuntutan dari berbagai pihak terkait atas peningkatan pelayanan yang diberikan

	Penyelenggaraan dibidang peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum dan informasi hukum yang masih belum harmonis	Masih terdapat inkonsistensi peraturan perundang- undangan	1. Tuntutan publik untuk mengembangkan penerapan akuntabilitas kinerja di semua Perangkat Daerah Provinsi untuk mendukung terwujudnya good governance dan clean government. 2. Tuntutan pelaksanaan reformasi regulasi
	Pengendalian dan Penyelenggaraan makro dan mikro ekonomi yang belum optimal	Tata kelola perekonomian daerah belum maksimal	Adanya upaya peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi kewilayahan, mendor ong laju investasi, percepatan pembangunan infrastrukturpedesaa n, sekaligus mengembangkan potensi unggulan denganmengakselera si secara cerdas terhadap pencapaian kesejahteraanrakyat
	Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan administrasi pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Pelaksanaan pembangunan terhambat	Adanya teknologi (e- monev, tepra) yang semakin maksimal

	Belum optimalnya proses Pengadaan Barang dan Jasa yang transparan dan akuntabel	Pelaksanaan pengadaan barang jasa tidak tepat waktu, tidak hemat biaya, dan tidak berkualitas	Adanya kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan good governance
	Penyelenggaraan tata laksana, kelembagaan serta pengembangan kinerja ASN dan pemerintah daerah yang belum optimal	Pola kerja antar perangkat daerah kurang sistematis	Adanya upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berupa kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja
	Pelaksanaan pelayanan umum dan kesekretariatan yang belum optimal	Kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan terhambat	Adanya tuntutan perbaikan layrananan pimpinan, tamu dan peneyediaan sarana prasarana yang lebih baik
	Belum optimalnya pelayanan dalam penyampaian informasi dan dokumentasi kepada publik	Kurangnya transparansi penyampain informasi publik	Tersedianya sarana prasarana teknologi dan informasi yang semakin lengkap dan memadai

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Berdasarkan penjelasan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah serta dengan mempertimbangkan hasil analisa terhadap isu-isu strategis yang ada, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Sekretariat Daerah yang ingin diwujudkan sampai tahun 2022 sebagai berikut:

A. TUJUAN

1. Terwujudnya penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintah umum, pembangunan dan pelayanan publik yang tepat
2. Terwujudnya pengkoordinasian administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah yang efisien dan tepat
3. Terwujudnya ASN pemerintah provinsi yang profesional dalam memberikan pelayanan
4. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi
5. Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
6. Terwujudnya penyusunan kebijakan di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum
7. Meningkatnya rekomendasi kebijakan bidang perekonomian
8. Meningkatnya akuntabilitas penyusunan kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan
9. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah atau negara
10. Birokrasi yang bersih dan akurat
11. Meningkatnya pelayanan umum dan kesekretariatan Setda
12. Tercapainya informasi kehumasan dan layanan keprotokolan yang efektif, efisien dan berkualitas

Masing-masing tujuan yang ingin dicapai telah ditetapkan indikator tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintah umum, pembangunan dan pelayanan publik yang tepat
2. Meningkatnya pengkoordinasian administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah yang efisien dan tepat
3. Meningkatnya jumlah pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilihan kepala daerah dan legislatif
5. Nilai rata-rata kepuasan masyarakat
6. Persentase kebijakan di bidang produk hukum, pelayanan hukum dan dokumentasi informasi
7. Persentase arah kebijakan perekonomian yang berkualitas
8. Persentase nilai akuntabilitas pengendalian pembangunan
9. Persentase kematangan kinerja pengadaan barang atau jasa yang memenuhi kondisi timeless (ketepatan waktu), cost saving (penghematan biaya), kwaliti atau kualitas baik dan kepuasan layanan atau IKM
10. Nilai RB Provinsi meningkat
11. Tingkat kepuasan pelayanan umum dan kesekretariatan Setda
12. Persentase informasi kehumumasa yang terpublikasi dan Persentase kepuasan keprotokolan

B. SASARAN

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sebanyak 21 sasaran dengan jumlah indikator sasaran sebanyak 24, diuraikan sebagai berikut :

I. Biro Pemerintahan

1. Meningkatnya kualitas dan jumlah kebijakan dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama
 - a. Indikatornya adalah Persentase urusan dalam LPPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki capaian kinerja dengan predikat tinggi

2. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama
 - a. Indikatornya adalah meningkatnya kuantitas penyelenggaraan urusan/kewenangan yang dilaksanakan pemerintah provinsi
3. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama
 - a. Indikatornya adalah terlaksananya pelayanan administrasi dan penyediaan dokumen bagi pemerintah daerah
4. Meningkatnya partisipasi publik dalam berdemokrasi dan berpolitik serta kebebasan menyampaikan pendapat/aspirasi

II. Biro Kesra

1. Meningkatnya pelayanan publik dibidang keagamaan
 - a. Indikatornya adalah Persentase fasilitasi bidang keagamaan
2. Meningkatnya pelayanan publik kepada penerima hibah dan bansos
 - a. Indikatornya adalah Persentase masyarakat penerima hibah dan bansos yang terbaru
3. Meningkatnya pelayanan di bidang pendidikan KB, pemuda dan Pariwisata
 - a. Persentase perumusan kebijakan dan koordinasi bidang pendidikan KB, pemuda dan pariwisata

III. Biro Hukum

1. Meningkatnya penyusunan kebijakan di bidang produk hukum, peyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum
 - a. Indikatornya adalah Persentase kualitas dan kuantitas produk hukum
 - b. Persentase pelayanan hukum pemerintah daerah
 - c. Persentase publikasi produk hukum

IV. Biro Perekonomian

1. Meningkatnya rekomendasi kebijakan di bidang sumber daya alam
 - a. Persentase rekomendasi kebijakan terkait sumber daya alam

V. Biro Pembangunan

1. Meningkatnya fasilitasi pengendalian kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan
 - a. Persentase fasilitasi kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan yang termanfaatkan

VI. Biro Layanan pengadaan

1. Terciptanya pengadaan barang atau jasa yang transparan, akuntabel, terbuka dan kompetitif
 - a. Persentase belanja pengadaan melalui e-procurement

VII. Biro Organisasi

1. Meningkatnya nilai manajemen perubahan
 - a. Persentase Peningkatan komitmen pimpinan PD dan pegawai dalam melakukan RB
 - b. Persentase pola pikir dan budaya kerja
 - c. Persentase menurunnya resiko kegagalan
2. Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi
 - a. Persentase perangkat daerah yang efektif dan efisien
3. Meningkatnya penataan ketatalaksanaan Pemda
 - a. Persentase peningkatan ketatalaksanaan Pemda
4. Meningkatnya nilai akuntabilitas
 - a. Persentase peningkatan nilai laporan kinerja
5. Meningkatnya kualitas pembinaan pelayanan publik
 - a. Index pelayanan publik

VIII. Biro Umum

1. Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan
 - a. Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan
2. Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan
 - a. Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan

3. Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang keuangan
 - a. Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang keuangan

IX. Biro Humas

1. Meningkatnya informasi kehumasan yang diterima oleh publik
 - a. Persentase informasi kehumasan yang diterima oleh publik
2. Meningkatnya agenda pimpinan daerah yang terlayani
 - a. Persentase agenda pimpinan daerah yang terlayani

C. INDIKATOR DAN TARGET TUJUAN/SASARAN

Sasaran ditetapkan indikator kinerjanya disertai target-target tahunan yang ingin dicapai selama lima tahun (2017-2022). Secara rinci dapat dilihat pada table IV.1 dan IV.2 sebagai berikut.

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai indikator utama Sekretariat Daerah maka ditetapkan Strategi dan Kebijakan sebagai berikut :

Strategi yang ditetapkan adalah :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah , administrasi kewilayahan, dan kerjasama
2. Meningkatkan kelengkapan bahan penyusun kebijakan dan fasilitasi kesejahteraan rakyat yang tepat sasaran
3. Optimalisasi dan sinkronisasi terhadap produk hukum , penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum
4. Menyusun rumusan dalam penyelenggaraan rekomendasi kebijakan dibidang administrasi perekonomian
5. Meningkatkan ketersediaan bahan pendukung penyusunan kebijakan pembangunan daerah
6. Meningkatkan kualitas dalam bidang Layanan pengadaan barang/jasa dan pengadaan secara elektronik
7. Penataan kebijakan kelembagaan, tatalaksana, analisis jabatan dan kepegawaian, administrasi pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi
8. Meningkatkan peran kehumasan dan keprotokolan dengan menyusun kebijakan yang lebih baik
9. Meningkatkan kualitas di dalam penyusunan kebijakan yang ditetapkan dibidang rumah tangga , keuangan , dan aset setda
10. Mengoptimalkan pengelolaan dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan, dan kerjasama
11. Meningkatkan koordinasi dibidang kesejahteraan rakyat
12. Meningkatkan koordinasi bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum

13. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan serta pengendalian indikator ekonomi makro dan mikro
14. Meningkatkan keselarasan pembangunan daerah
15. Meningkatkan kualitas dalam pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pengadaan secara elektronik
16. Meningkatkan koordinasi dibidang kelembagaan, tatalaksana, analisis jabatan dan kepegawaian, administrasi pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi
17. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan keprotokolan
18. Meningkatkan koordinasi yang ditetapkan di bidang rumahtangga , keuangan , dan aset setda

Arah kebijakan yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan kebijakan otonomi daerah , administrasi kewilayahan, dan kerjasama
2. Meningkatkan mutu dalam pelayanan publik
3. Menyusun produk hukum , penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum berdasarkan azas hukum dan taat prosedur
4. Melaksanakan pengawasan dan pengembangan dibidang administrasi perekonomian
5. Menyusun dokumen pendukung penyusun kebijakan
6. Optimalisasi dan pengembangan e-monev APBD dan APBN
7. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dan publik dalam mengakses data dan informasi realisasi serapan anggaran
8. Penguatan kualitas Layanan pengadaan barang/jasa dan pengadaan secara elektronik
9. Penguatan penataan kebijakan kelembagaan, tatalaksana, analisis jabatan dan kepegawaian , administrasi pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi
10. Memperkuat pelayanan kehumasan dan keprotokolan

11. Memperkuat pelayanan yang di tetapkan di bidang rumahtangga, keuangan, dan aset setda
12. Mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, administrasi kewilayahan, dan kerjasama
13. Meningkatkan koordinasi dengan para steakholder lainnya
14. Meningkatkan mutu produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum
15. Mengoptimalkan koordinasi penyelenggaraan serta pengendalian indikator ekonomi makro dan mikro
16. Meningkatkan kualitas koordinasi pembangunan daerah
17. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
18. Meningkatkan pengendalian
19. Penguatan kualitas pengadaan barang/jasa dan pengadaan secara elektronik
20. Menciptakan kualitas kebijakan dibidang kelembagaan, tatalaksana, analisis jabatan dan kepegawaian , administrasi pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi
21. Memperkuat pelayanan kehumasan dan keprotokolan
22. Mempermudah dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel V.1 berikut ini

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Strategi dan arahan kebijakan pada bab sebelumnya maka ditetapkan program yang direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja. Adapun program yang ditetapkan adalah :

1. Biro Pemerintahan

- a. Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan
- b. Program Pengembangan Otonomi Daerah
- c. Program Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah

2. Biro Kesejahteraan Rakyat

- a. Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan
- b. Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB dan Pemuda
- c. Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3. Biro Hukum

- a. Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- b. Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah
- c. Program Pengembangan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum

4. Biro Perekonomian

- a. Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian
- b. Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam
- c. Program Peningkatan Koordinasi BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya

5. Biro Pembangunan

- a. Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD
- b. Program Perencanaan Setda

- c. Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN
- d. Program Pengendalian Pembangunan Daerah

6. Biro Layanan Pengadaan

- a. Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan
- b. Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
- c. Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

7. Biro Umum

- a. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

8. Biro Organisasi

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisis Jabatan
- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah
- c. Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah

9. Biro Humas Dan Protokol

- a. Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi
- b. Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media dan IT
- c. Program Peningkatan Pelayanan Protokoler

6.1 INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan dari setiap program/kegiatan.

Kelompok sasaran utama sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan adalah pimpinan daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta program/kegiatan pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

6.2 PENDANAAN PAGU INDIKATIF

Pendanaan untuk pelaksanaan dari setiap program/kegiatan merupakan pagu indikatif yang diperkirakan dibutuhkan untuk menjalankan setiap kegiatan untuk Tahun 2017-2022 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Keterkaitan antara program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan dan kelompok sasaran serta Pendanaan Pagu Indikatif dapat dilihat pada lampiran VI.1.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka ada dua indikator yang dirumuskan dan ditetapkan. Pertama adalah indikator kinerja utama yang merupakan indikator tujuan dan sasaran sebagai berikut :

I. Indikator tujuan yaitu :

1. Meningkatnya penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintah umum, pembangunan dan pelayanan publik yang tepat
2. Meningkatnya pengkoordinasian administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah yang efisien dan tepat
3. Meningkatnya jumlah pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilihan kepala daerah dan legislatif
5. Nilai rata-rata kepuasan masyarakat
6. Persentase kebijakan di bidang produk hukum, pelayanan hukum dan dokumentasi informasi
7. Persentase arah kebijakan perekonomian yang berkualitas
8. Persentase nilai akuntabilitas pengendalian pembangunan
9. Persentase kematangan kinerja pengadaan barang atau jasa yang memenuhi kondisi timeless (ketepatan waktu), cost saving (penghematan biaya), kwaliti atau kualitas baik dan kepuasan layanan atau IKM
10. Nilai RB Provinsi meningkat
11. Tingkat kepuasan pelayanan umum dan kesekretariatan Setda
12. Persentase informasi kehumumasan yang terpublikasi dan Persentase kepuasan keprotokolan

II. Indikator sasaran yaitu :

1. Persentase urusan dalam LPPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki capaian kinerja dengan predikat tinggi
2. Meningkatnya kuantitas penyelenggaraan urusan/kewenangan yang dilaksanakan pemerintah provinsi
3. Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyediaan dokumen bagi pemerintah daerah
4. Persentase fasilitasi bidang keagamaan
5. Persentase masyarakat penerima hibah dan bansos yang terbaru
6. Persentase perumusan kebijakan dan koordinasi bidang pendidikan KB, pemuda dan pariwisata
7. Persentase kualitas dan kuantitas produk hukum
8. Persentase pelayanan hukum pemerintah daerah
9. Persentase publikasi produk hukum
10. Persentase rekomendasi kebijakan terkait sumber daya alam
11. Persentase fasilitasi kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan yang memanfaatkan
12. Persentase belanja pengadaan melalui e-procurement
13. Persentase Peningkatan komitmen pimpinan PD dan pegawai dalam melakukan RB
14. Persentase pola pikir dan budaya kerja
15. Persentase menurunnya resiko kegagalan
16. Persentase perangkat daerah yang efektif dan efisien
17. Persentase peningkatan ketatalaksanaan Pemda
18. Persentase peningkatan nilai laporan kinerja
19. Index pelayanan publik
20. Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan
21. Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan
22. Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang keuangan
23. Persentase informasi kehumasan yang diterima oleh publik
24. Persentase agenda pimpinan daerah yang terlayani

Kedua adalah indikator kinerja kunci yang merupakan indikator program dan kegiatan. Sekretariat Daerah memiliki 26 program dan 179 kegiatan sebagai berikut :

1. Program peningkatan koordinasi BUMD, penanaman modal, pariwisata dan budaya, indikator program adalah Persentase koordinasi BUMD, penanaman modal, pariwisata dan budayadengan kegiatan yaitu :

- a. Koordinasi Program CSR indikator kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi/Kesepakatan Program CSR
 - b. Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal di Prov.Kep.Babel indikator kegiatan adalah Jumlah penyertaan Modal
 - c. Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung indikator kegiatan adalah Jumlah kesepakatan bersama terbentuknya bank umum syariah Bangka Belitung
 - d. Monitoring dan Evaluasi tata kelola BUMD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung indikator kegiatan adalah Jumlah Dokumen tata laksana BUMD se-Provinsi Kep.Babel yang aktif
 - e. Pemetaan Potensi Investasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung indikator kegiatan adalah Jumlah data potensi investasi
 - f. Koordinasi dan Monev Kajian Penyertaan Kebijakan Destinasi wisata baru di Prov.Kep.Babel indikator kegiatan Jumlah laporan pengembangan Destinasi wisata baru
 - g. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi kajian dan penyusunan perlindungan benda cagar budaya (BCB) atau benda diduga cagar budaya indikator kegiatan jumlah BCB dan Benda diduga BCB yang dilindungi
2. Program peningkatan koordinasi kebijakan sumber daya alam indikator program adalah Persentase koordinasi kebijakan sumber daya alam dengan kegiatan yaitu :
- a. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Distribusi Penggunaan subsidi listrik di Provinsi Kep.Babel indikator kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi bidang energi dengan Rekomendasi yang di tindak lanjuti
 - b. Koordinasi, monitoring dan Evaluasi Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas indikator kegiatan adalah Jumlah laporan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas
 - c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penataan serta pengembangan lahan kritis di Prov.Kep.Babel indikator kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi kebijakan kerjasama investasi pertambangan Timah dengan yang ditindaklanjuti

- d. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi komoditi pangan di Prov.Kep.Babel indikator kegiatan adalah Jumlah laporan komoditi pangan
 - e. Koordinasi dan Evaluasi Tim Terpadu penanganan penambangan timah di Prov.Kep.Babel indikator kegiatan adalah Jumlah Laporan Rekomendasi penanganan masalah pertambangan timah
 - f. Koordinasi dan Monitoring pengembangan potensi energi baru terbarukan di Prov.Kep.Babel indikator kegiatan adalah Jumlah potensi energi baru terbarukan
3. Program peningkatan koordinasi kebijakan perekonomian indikator program adalah Persentase koordinasi kebijakan ekonomi dengan kegiatan yaitu :
- a. Koordinasi, Monev Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta penguatan kerjasama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung indikator kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi Pengendalian Inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - b. Pengendalian Evaluasi Koperasi, UKM dan UMKM di Prov.Kep.Babel indikator kegiatan adalah jumlah laporan pengendalian dan evaluasi Koperasi, UKM dan UMKM di Prov.Kep.Babel
 - c. Pengawasan Supply, Demand dan Evaluasi Makro dan Mikro Ekonomi di Prov.Kep.Babel indikator kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi Makro dan Mikro Ekonomi
 - d. Promosi potensi produk unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung indikator kegiatan adalah Jumlah laporan perkembangan destinasi wisata baru
 - e. Pengendalian Evaluasi Industri Hilirisasi di Prov.Kep.Babel indikator kegiatan adalah Jumlah laporan pengendalian,evaluasi industri Hilirisasi di Prov.Kep.Babel
 - f. Peningkatan Sarana,Prasarana dan Evaluasi Resi Gudang di Prov. Kep. Babel indikator kegiatan adalah Jumlah Laporan peningkatan sarana prasarana perekonomian yang Representative
 - g. Forum Pengembangan Ekonomi indikator kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi data perkembangan ekonomi daerah

4. Program peningkatan koordinasi kebijakan pendidikan, KB, pemuda dan pariwisata indikator program adalah persentase koordinasi kebijakan pendidikan, KB, pemuda dengan kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung indikator kegiatan Jumlah sekolah yang dinilai
 - b. Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat di Provinsi dengan indikator kegiatan adalah Jumlah partisipasi acara HUT Bangka Belitung
5. Program peningkatan pembinaan keagamaan indikator program adalah persentase pembinaan keagamaan dengan kegiatan :
 - a. Pembinaan Mental dan Spritual Masyarakat provinsi Kep bangka Belitung indikator kegiatan adalah Persentase pembinaan Masyarakat
 - b. Peningkatan kehidupan beragama pada bulan Ramadhan indikator kegiatan adalah Frekuensi Penyelenggaraan safari ramadhan
 - c. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama indikator kegiatan adalah Jumlah yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
 - d. Pendampingan jamaah haji indikator kegiatan adalah Terseleksinya Petugas haji daerah TPHD/TKHD
 - e. Pembiayaan Transportasi Domestiik Jemaah Haji indikator kegiatan adalah jumlah jemaah haji yang terfasilitasi biaya domestik haji
 - f. Penyelenggaraan Pemberangkatan dan pemulangan Haji indikator kegiatan adalah Jumlah jemaah haji yang di fasilitasi
 - g. Pembinaan dan Pemberangkatan Khafilah STQ Nasional indikator kegiatan adalah Jumlah Kafilah yang mengikuti MTQ/STQ
 - h. Musabaqoh Hafidz Quran Internasional indikator kegiatan adalah Frekuensi musabaqoh hafiz
6. Program peningkatan koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi indikator program Persentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi dengan kegiatan :
 - a. Rapat Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator kegiatan adalah Terlaksanya pelayanan yang optimal kepada masyarakat

- b. Rasio Rekomendasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi dengan ditindaklanjuti dengan indikator kegiatan adalah Jumlah rekomendasi kebijakan
 - c. Monitoring Evaluasi dan bantuan Sosial Hibah Meningkatnya kegiatan monitoring dan evaluasi bansos dan hibah
 - d. Evaluasi dan Analisis Proposal Bansos dan Hibah Terlaksananya Evaluasi dan Analisis Proposal Bansos dan Hibah
7. Program pengendalian pembangunan daerah indikator program adalah Persentase pengendalian pembangunan daerah dengan kegiatan yaitu :
- a. Koordinasi Sinkronisasi Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota indikator kegiatan Jumlah Rencana Tindak Lanjut (RTL)
 - b. Koordinasi Sistem Monitoring TEPR (SISMONTEP) Provinsi Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan adalah Jumlah Laporan Koordinasi Sismontep
 - c. Tim Evaluasi dan Pengawasan Internal Realisasi Anggaran (TEPR) Provinsi Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan adalah Jumlah Kesepakatan/Rekomendasi
 - d. Koordinasi Tim Terpadu Pengendalian Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung indikator kegiatan adalah Jumlah Kesepakatan Rencana Tindak Lanjut (RTL)
8. Program monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD indikator program adalah persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD dengan kegiatan yaitu :
- a. Koordinasi Sistem e-Monev APBD dengan indikator kegiatan adalah Jumlah Dokumen dan Laporan
 - b. Koordinasi Penyempurnaan Aplikasi e-Monev APBD dengan indikator kegiatan Jumlah Aplikasi e-Monev APBD
 - c. Kebijakan Monitoring Evaluasi APBD indikator kegiatan Jumlah Laporan dan Rekomendasi
 - d. Penyusunan Kebijakan dan Implementasi Jaringan Aplikasi e-monev berkelanjutan indikator kegiatan Jumlah rekomendasi yang dihasilkan

- e. Penggunaan Aplikasi e-monev APBD indikator kegiatan Jumlah SDM yang memahami aplikasi
9. Program perencanaan setda, indikator program Persentase dokumen perencanaan setda dengan kegiatan yaitu :
- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah, indikator kegiatan jumlah Dokumen Perencanaan
 - b. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat Daerah, indikator kegiatan adalah jumlah Dokumen Pelaporan
 - c. Pengintegrasian Sistem Informasi Data, indikator kegiatan adalah Data yang Terintegrasi
10. Program monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBN, indikator program Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBN dengan kegiatan yaitu :
- a. Pengelolaan Pengembangan Aplikasi Sistem e-Monev APBN, indikator kegiatan Jumlah Aplikasi e-Monev APBN, indikator kegiatan Jumlah Aplikasi e-Monev APBN
 - b. Tim Terpadu Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan APBN, indikator kegiatan Jumlah Kesepakatan/Rekomendasi
 - c. Koordinasi Kebijakan APBN, indikator kegiatan Draft Regulasi atau Rekomendasi Evaluasi APBN
11. Program peningkatan penataan peraturan perundang-undangan, indikator program Persentase penataan peraturan perundang-undangan dengan kegiatan yaitu :
- a. Penyusunan Propemperda dan Rancangan Peraturan Daerah, indikator kegiatan Jumlah usulan Propemda dan Raperda yang selesai disusun
 - b. Penyusunan Produk Hukum Daerah, indikator kegiatan Jumlah PHD yang selesai disusun
 - c. Penyusunan Naskah Hukum Lainnya, indikator kegiatan Jumlah Naskah Hukum Lainnya yang telah selesai disusun
 - d. Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota, indikator kegiatan Presentase perda yang di tindaklanjuti

- e. Rapat Koordinasi Program Pembentukan Peraturan Daerah, indikator kegiatan Jumlah Rekomendasi
 - f. Bimtek Legal Drafting, indikator kegiatan Jumlah pelaksanaan bimtek
 - g. Pembinaan Teknis Penyusunan PHD Kabupaten/Kota, indikator kegiatan Jumlah Rancangan PHD Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan Teknis
12. Program peningkatan pelayanan hukum pemerintah daerah, indikator program Persentase pelayanan hukum pemerintah daerah dengan kegiatan yaitu :
- a. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa antara Pemda dengan orang/masyarakat secara litigasi atau non litigasi, indikator kegiatan Jumlah Kasus
 - b. Penyelesaian Sengketa TUN akibat pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Pemda, indikator kegiatan Jumlah Kasus
 - c. Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum dan penyelesaian Sengketa akibat pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Kebijakan pemda di Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, indikator kegiatan Jumlah Laporan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Kab/Kota
 - d. Pembinaan Pelaksanaan RANHAM di Provinsi Kab/Kota, indikator kegiatan Jumlah Laporan
 - e. Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, indikator kegiatan Jumlah masyarakat miskin yang diberikan bantuan hukum
 - f. Penyuluhan Hukum di 7 Wilayah Kabupaten/Kota, indikator kegiatan Jumlah orang yang diberikan penyuluhan
 - g. Bimtek Penyelesaian Akibat pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda, indikator kegiatan Jumlah Peserta
13. Program pengembangan dokumentasi hukum dan informasi hukum, indikator program Persentase dokumentasi hukum dan informasi hukum dengan kegiatan yaitu :
- a. Pengelolaan dan pengembangan JDIH, indikator kegiatan Jumlah PHD yang di publikasi melalui Website JDH

- b. Pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan Hukum, indikator kegiatan Jumlah Rak dan Buku Perpustakaan Hukum
 - c. Penyusunan Kompilasi Perda dan Pergub dan Katalog Perda-Pergub tahun 2017 dan katalog perda dan Pergub Tahun 2001-2017, indikator kegiatan Jumlah Buku
 - d. Penyusunan Arsip Produk Hukum Daerah (PHD), indikator kegiatan Jumlah PHD yang diarsipkan
 - e. Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kab/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, indikator kegiatan Jumlah Rekomendasi
 - f. Sosialisasi Perda, indikator kegiatan Jumlah Perda yang disosialisasikan
 - g. Penyusunan Abstrak Produk Hukum Daerah, indikator kegiatan Jumlah Buku Abstrak PHD yang disusun
 - h. Rapat Koordinasi JDIH Provinsi dan Kabupaten / Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, indikator kegiatan Jumlah Rekomendasi di Bidang JDIH
 - i. Bimbingan Teknis Sistem Informasi Hukum, indikator kegiatan Jumlah Peserta Bimtek
14. Program peningkatan publikasi, pengumpulan dan penyaringan informasi, indikator program Persentase publikasi, pengumpulan dan penyaringan informasi dengan kegiatan yaitu :
- a. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, indikator kegiatan jumlah bahan bacaan untuk aparatur di sekretariat daerah (Eksemplar)
 - b. Pengumpulan, Penyaringan Informasi dan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan Luar Daerah, indikator kegiatan frekuensi Tingkat Pendampingan Layanan Publikasi dan Keprotokolan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan luar Daerah (Kali)
 - c. Penguatan Fungsi Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, indikator kegiatan Jumlah PD yang memiliki website humas aktif dan dapat diakses

- d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan layanan kehumasan dan keprotokolan, indikator kegiatan Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan dalam mendukung layanan kehumasan dan keprotokolan (unit)
 - e. Peningkatan kualitas SDM dan Koordinasi Kehumasan dan Keprotokolan, indikator kegiatan Jumlah SDM yang mengikuti kursus/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi di Luar Daerah (Orang)
 - f. Penyediaan Pakaian khusus lapangan Humas dan Protokol, indikator kegiatan Jumlah pakaian Khusus kerja (Orang)
15. Program peningkatan pelayanan kehumasan, dokumentasi, publikasi media dan IT, indikator program Persentase pelayanan kehumasan dokumentasi, publikasi media dan IT dengan kegiatan yaitu :
- a. Publikasi Media Massa/Cetak, indikator kegiatan Publikasi Media Massa/Cetak, indikator kegiatan Jumlah Publikasi di Media Massa/Cetak (Tayang)
 - b. Publikasi Media Elektronik/ IT, indikator kegiatan Jumlah Tayangan Publikasi di Media elektronik dan IT (Tayang)
 - c. Pendokumentasian dan Belanja Spanduk/Baleho, indikator kegiatan Jumlah Tayang Publikasi Media Luar (Tayang)
 - d. Penerbitan Majalah/ Bullettin Pemerintah Provinsi, indikator kegiatan Jumlah Terbitan Majalah/Buletin Pemerintah Provinsi (Eksemplar)
 - e. Media Gathering, indikator kegiatan Jumlah peserta Media Gathering dari Media Lokal maupun Nasional (Orang)
 - f. Workshop Humas Bidang Media Elektronik dan IT, indikator kegiatan Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang Media Elektronik dan IT (Orang)
 - g. Workshop Bidang Kehumasan, indikator kegiatan Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang Kehumasan (Orang)
16. Program peningkatan pelayanan protokoler, indikator program Persentase pelayanan protokoler dengan kegiatan yaitu :
- a. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, indikator kegiatan jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (Buah)

- b. Workshop Bidang Keprotokolan, indikator kegiatan Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang keprotokolan (Orang)
 - c. Layanan Tamu Pemerintah dan Negara, indikator kegiatan jumlah layanan tamu pemerintah dan negara (orang)
 - d. Peningkatan Fungsi Keprotokolan, indikator kegiatan Tersedianya IT untuk Keprotokolan (Aplikasi)
17. Program peningkatan dan pengembangan kelembagaan serta analisis jabatan indikator program persentase kualitas kelembagaan serta analisis jabatan dengan kegiatan yaitu :
- a. Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, indikator kegiatan Persentase Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibina
 - b. pembinaan kelembagaan UPT/Cabang dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung indikator kegiatan Jumlah UPT/ Cabang Dinas Provinsi
 - c. sinkronisasi kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, indikator kegiatan Jumlah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
 - d. Rapat Koordinasi kelembagaan dan analisa jabatan, indikator kegiatan Jumlah peserta
 - e. Monitoring kelembagaan UPT/Cabang Dinas Kabupaten Kota, indikator kegiatan Jumlah Kabupaten/Kota yang di monitoring
 - f. Kompilasi peningkatan Data Kelembagaan Provinsi, Kabupaten, Kota, indikator kegiatan Jumlah Data Kelembagaan Kabupaten/Kota se - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - g. Pembinaan Kelembagaan Kabupaten/Kota, indikator kegiatan Jumlah Kabupaten/Kota yang di bina
 - h. Review pelaksanaan Peraturan Gubernur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, indikator kegiatan Dokumen review pelaksanaan peraturan gubernur
 - i. Evaluasi Kelembagaan Perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, indikator kegiatan Dokumen Evaluasi

- j. Evaluasi UPT/Cabang Dinas Perangkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, indikator kegiatan Dokumen Evaluasi
- k. Review pelaksanaan Peraturan Gubernur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT/ Cabang Dinas pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, indikator kegiatan Dokumen review
- l. Rapat Penataan kelembagaan non perangkat daerah provinsi kepulauan bangka belitung, indikator kegiatan Jumlah Dokumen kesepakatan
- m. Sinkronisasi uraian tugas perangkat daerah kabupaten dan kota sesuai dengan peraturan yang berlaku, indikator kegiatan Jumlah laporan sinkronisasi uraian tugas
- n. Pembinaan kelembagaan perangkat daerah provinsi kab/kota, indikator kegiatan monitoring pelaksanaan Peraturan gubernur tentang uraian tugas kelembagaan non perangkat daerah
- o. Penyusunan Standar kompetensi teknis pegawai negeri sipil pada perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung, indikator kegiatan Persentase ASN yang memahami Standar Kompetensi Teknis
- p. Pembinaan dan analisa jabatan dan beban kerja, indikator kegiatan Jumlah dokumen pembinaan dan analisa beban kerja
- q. Evaluasi jabatan pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung, indikator kegiatan Jumlah Jabatan ASN/PNS yang terevaluasi
- r. Pembinaan dan analisa jabatan kabupaten dan kota, indikator kegiatan Jumlah dokumen pembinaan penyusunan jabatan kabupaten dan kota
- s. Penyusunan standar kompetensi teknis pegawai negeri sipil pada perangkat daerah di lingkungan prov.kep. Bangka belitung, indikator kegiatan Jumlah dokumen kompetensi jabatan/teknis kabupaten/kota

- t. Pelaksanaan analisa jabatan PNS Provinsi kepulauan bangka belitung, indikator kegiatan Persentase ASN yang memahami analisa jabatan
 - u. Pelaksanaan analisa beban kerja PNS Provinsi kepulauan bangka belitung, indikator kegiatan Persentase ASN/PNS yang memahami Analisa beban kerja
 - v. Penyusunan peta jabatan pns Pemprov kep bangka belitung, indikator kinerja Persentase usulan jabatan ASN/ PNS
18. Program peningkatan dan pengembangan tata laksana pemerintah daerah, indikator program Persentase kualitas tatalaksana pemerintah daerah
- a. Pembinaan pelaksanaan pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, indikator kegiatan Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik
 - b. Bimtek penyusunan proposal dan pelatihan admin kompetisi inovasi pelayanan publik, indikator kegiatan persentase OPD yang memahami penyusunan proposal dan mengikuti Sinovik
 - c. Koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, indikator kegiatan Jumlah dokumen Rekomendasi hasil evaluasi yang dapat ditindaklanjuti
 - d. Audit Surveillance ISO 9001:2008 menuju Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk samsat sungailiat, indikator kegiatan jumlah ketetapan atas ISO
 - e. Pelaksanaan Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, indikator krgiatan jumlah dokumen
 - f. pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, indikator kegiatan Jumlah Laporan pembinaan pelaksanaan SOP
 - g. Rapat Koordinasi Biro/Bagian Organisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, indikator kegiatan Jumlah peserta
 - h. Roadmap pelaksanaan reformasi birokrasi, indikator kegiatan Jumlah dokumen roadmap pelaksanaan reformasi birokrasi

- i. penyelenggaraan standar pelayanan minimal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, indikator kegiatan Jumlah laporan optimalisasi penyelenggaraan SPM
19. Program peningkatan dan pengembangan kinerja pemerintah daerah, indikator program Persentase pelaksanaan kinerja pemerintah daerah, dengan kegiatan yaitu :
- a. Penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja, indikator kegiatan Jumlah buku laporan kinerja instansi pemerintah dan perjanjian kinerja
 - b. Penyusunan pedoman indikator kinerja utama, indikator kegiatan Jumlah buku pedoman indikator kinerja utama provinsi
 - c. Bimbingan teknis penyusunan laporan kinerja, perjanjian kinerja dan rencana aksi kinerja, di lingkungan pemprov babel, indikator kegiatan Jumlah peserta bimtek
 - d. Pembinaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, indikator kegiatan Jumlah Laporan
 - e. Pembinaan standar manajemen mutu pada OPD, capdin dan UPT di lingkungan pemprov babel, indikator kegiatan Jumlah laporan
 - f. Rakor evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah, indikator kegiatan Jumlah Laporan
 - g. Bimbingan teknis pengisian LHKPN, indikator kegiatan Jumlah peserta
 - h. Pembangunan zona integritas, indikator kegiatan Jumlah laporan
 - i. Rapat Koordinasi evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah
 - j. Penyusunan data base capaian kinerja individu, indikator kegiatan Jumlah laporan
 - k. Penyusunan standar capaian kinerja individu ASN, indikator kegiatan Jumlah buku, pergub dan laporan
 - l. Penyusunan standar reward capaian kinerja individu dan perangkat daerah, indikator kegiatan Jumlah pergub, jumlah laporan
 - m. Penyusunan pedoman pengembangan penerapan budaya kerja ASN, indikator kegiatan Jumlah pergub, jumlah laporan

- n. Bimbingan teknis penyusunan capaian kinerja individu ASN dilingkungan pemprov babel, indikator kegiatan jumlah peserta
 - o. Penyusunan profil aparatur jabatan struktural, indikator kegiatan Jumlah laporan
 - p. Pembinaan dan evaluasi profil aparatur UPT Pemprov, indikator kegiatan Jumlah laporan
 - q. Forum sekretaris daerah, indikator kegiatan Jumlah laporan
 - r. Forum staf ahli kepala Daerah, indikator kegiatan Rakor dan laporan
20. Program pengembangan data informasi layanan pengadaan, indikator program persentase ketersediaan data informasi layanan pengadaan dengan kegiatan yaitu :
- a. Peningkatan pelayanan publik, indikator kegiatan Jumlah dokumen SOP dan Penerapannya
 - b. Pengelolaan Data dan Informasi, indikator kegiatan Jumlah admin OPD Sistem Informasi pengadaan Barang/jasa
 - c. Peningkatan Administrasi dan Ketatausahaan, indikator kegiatan Jumlah dokumen dukungan data perencanaan, pelaporan dan ketatausahaan
 - d. Peningkatan penerapan data dan informasi layanan, indikator kegiatan Jumlah penerapan aplikasi sistem pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa
21. Program peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa, indikator program Persentase layanan pengadaan barang dan jasa, dengan kegiatan yaitu :
- a. Peningkatan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa, indikator kegiatan Frekuensi Pelatihan/Pembinaan/bimtek/Pendampingan
 - b. Peningkatan Pelayanan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, indikator kegiatan Frekuensi Pendampingan dan Monev Pengadaan
 - c. Pencegahan dan Penanganan Pengaduan, indikator kegiatan Frekuensi Sosialisasi Pencegahan dan Pengaduan
 - d. Peningkatan fungsi pelayanan ULP, indikator kegiatan Jumlah Bulan Layanan Pengadaan oleh ULP

22. Program peningkatan layanan pengadaan secara elektronik, indikator program Persentase Layanan Pengadaan barang dan jasa secara elektronik
- Peningkatan Layanan dan Dukungan Pengadaan Secara Elektronik, indikator kegiatan Jumlah Penerapan aplikasi pendukung SPSE
 - Peningkatan Pelayanan dan Registrasi dan Verifikasi, indikator kegiatan Jumlah penerapan aplikasi penyediaan barang/jasa
 - Pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, indikator kegiatan Jumlah bulan pemeliharaan jaringan dan perangkat SPSE
 - Peningkatan Fungsi LPSE, indikator kegiatan Jumlah waktu/bulan layanan oleh LPSE
23. Program peningkatan administrasi kewilayahan, indikator program Persentase administrasi kewilayahan, dengan kegiatan yaitu :
- Kegiatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung, indikator kegiatan Jumlah bidang tanah yang disertifikat
 - Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, indikator kegiatan Jumlah rekomendasi penyelesaian batas daerah (1 sengketa)
 - Kegiatan Inventarisasi Pendataan, Penamaan, Dan Pembakuan Unsur Rupabumi (unsur buatan), indikator kegiatan Jumlah pulau yang terinventarisir
 - Kegiatan Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas daerah, indikator kegiatan Jumlah pilar batas yang diinventarisir dan dipelihara
 - Kegiatan Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota diProvinsi Kepulauan Bangka, indikator kegiatan jumlah pilar batas yang dipasang
 - Pengadaan Lahan, indikator kegiatan Jumlah Lahan yang tersedia
24. Program pengembangan otonomi daerah, indikator program Persentase pelaksanaan otonomi daerah dengan kegiatan yaitu :
- Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), indikator kegiatan Tersusunnya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 1 Dokumen

- b. Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kunci, serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017, indikator kegiatan Dokumen LPPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 50 Dokumen
- c. Kegiatan perencanaan, evaluasi dan penyusunan laporan internal Biro Pemerintahan, indikator kegiatan Jumlah dokumen perencanaan, laporan internal Biro Pemerintahan dan evaluasi 6 Dokumen
- d. Kegiatan Penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, indikator kegiatan Jumlah dokumen EKPPD Kabupaten/Kota yang tersusun 7 Dokumen
- e. Kegiatan Desk Pilkada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, indikator kegiatan Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi pelaksanaan Pilkada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3 Kabupaten/Kota
- f. Kegiatan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Penngangkatan KDH dan WKDH, indikator kegiatan Jumlah KDH dan WKDH Kabupaten/Kota yang dilantik di Provinsi 6 Orang
- g. Kegiatan Implementasi Proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota, indikator kegiatan Jumlah SK PAW Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung 5 SK
- h. Kegiatan Perizinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Ketua/Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung ke Luar Negeri, indikator kegiatan Jumlah Izin ke Luar Negeri yang dikeluarkan 10 Surat Izin
- i. koordinasi optimalisasi penyelenggaraan urusan/kewenangan dan kebijakan Otonomi Daerah di Prov. Kep. Bangka Belitung, indikator kegiatan Persentase terlaksananya secara optimal penyelenggaraan urusan/kewenangan dan kebijakan otonomi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 100 %

- j. Kegiatan Rapat koordinasi penerapan pelaksanaan NSPK di Prov. Kep. Bangka Belitung, indikator kegiatan Jumlah peserta Rakor NSPK 50 orang
 - k. Kegiatan workshop penataan dan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, indikator kegiatan Jumlah pelaksanaan workshop 1 kali workshop
25. Program pengembangan kerja sama pemerintah daerah, indikator program Persentase kerjasama pemerintah daerah, dengan kegiatan yaitu :
- a. Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, indikator kegiatan Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - b. Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakernas APPSI, indikator kegiatan Jumlah keikutsertaan Pemerintah Provinsi dalam APPSI 4 Kali
 - c. Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan, indikator kegiatan Jumlah keikutsertaan dalam BKS Provinsi Kepulauan 4 Kali
 - d. Verifikasi dan Validasi bantuan pemerintah provinsi kepada Pemerintah/pemerintahan daerah lainnya dan BUMD, indikator kegiatan Jumlah proposal bantuan hibah yang diverifikasi 4 proposal bantuan
 - e. Pengembangan Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama, indikator kegiatan Jumlah dokumen kerjasama 10 dokumen
 - f. Inventarisasi potensi kerjasama, indikator kegiatan Jumlah dokumen inventarisasi potensi daerah yang dapat dikerjasamakan oleh perangkat daerah 1 dokumen
 - g. Penyelarasan Program Pemerintah Daerah dan Pusat
26. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, indikator program Persentase kerjasama pemerintah daerah, dengan kegiatan yaitu :
- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran, indikator kegiatan Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan

- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, indikator kegiatan Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan
- c. Peningkatan Disiplin Aparatur, indikator kegiatan Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya
- d. Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Daerah, indikator kegiatan Presentase pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD serta Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 sesuai dengan Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel VII.1 dan tabel VII.2 sebagai berikut :

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022 merupakan pedoman Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta penilaian kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Pelaksanaan periode Renstra ini dapat dilakukan evaluasi untuk menemukan dan menilai capaian kinerja serta usaha perbaikan dalam hal strategi dan kebijakan. Sehingga pada akhirnya seluruh target kinerja yang telah disepakati dapat tercapai.

Pencapaian kinerja secara maksimal Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diharapkan dapat mendukung visi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 mewujudkan Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi.

Tabel II.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun (2012-2017)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2012-2017 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Target Program dan Kegiatan (renja PD Tahun 2016)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja PD Tahun 2015	Realisasi Renja PD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4	12
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian										
1.20.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
	Penyediaan jasa surat menyurat	jasa pos keperluan surat menyurat	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Tagihan Rekening - rekening Jasa Telekomunikasi dan Listrik	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa sewa sarana mobilitas, sewa meja kursi, sewa tenda, sewa sound system dan sewa panggung dan dekorasi	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%	

	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan, peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk Gd. Kantor Gubernur, Gd. PKK, Gd. Serbaguna dan VIP Bandara	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, meubelair, alat studio dan alat komunikasi	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%	
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor kebutuhan Setda	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan Setda Prov. Kep. Babel	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya lampu kantor dan lampu emergency, stabilizer, kabel box, stekker, baterai kering, stop kontak, saklar dll	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya souvenir, plakat, pigura/dokumentasi, cetak undangan kalender dan cetak buku kerja/agenda serta cetak spanduk	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%	

	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih, laundry, makan minum rumah tangga KDH dan WKDH	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran, majalah, buletin dll	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan - kegiatan pelayanan tamu rapat dan acara - acara ataupun event/ agenda- agenda kegiatan Pemerintah Prov. Kep. Bangka	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%	
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan - kegiatan pelayanan tamu rapat dan acara - acara ataupun event/ agenda- agenda kegiatan Pemerintah Prov. Kep. Bangka	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi langsung ke luar daerah	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya honorarium pegawai non PNS pengelolaan administrasi perkantoran	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%	

	Penyediaan jasa pelayanan tamu Pemerintah	Tersedianya fasilitas tamu - tamu Pemerintah Provinsi (transportasi dan akomodasi, hotel, makan siang/snack)	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%	
	Pembinaan Administrasi Pemerintah dan Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Kab/Kota	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%	
	Kegiatan rumah dinas Gubernur	Tersedianya sewa peralatan dan perlengkapan (meja, kursi, tenda. Sound system, panggung dan dekorasi) dan makan minum serta pakaian seragam panitia dalam menunjang kegiatan di rumah dinas Gubernur	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%	
	Biaya Operasional Pengelolaan Gedung Kantor (Wisma Bougenville)	Tersedianya operasional pengelolaan gedung wisma Bougenville	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	75%	
	Kegiatan Penilaian Asset Wisma Bougenville	Tersedianya data asset wisma Bougenville	1 Dokumen	0	1 dokumen	0	0	0	0	0	
	Kegiatan Pembinaan Administrasi kegiatan dan Keuangan intern SKPD	Sosialisasi pengadministrasi pengelolaan keuangan daerah di SKPD Sekretariat Daerah	3 Paket	0	1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	66.6%	

1.20.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
	Pembangunan gedung kantor	DED dan pembangunan gudang kantor	15 unit	1 unit	5 unit	5 unit	100%	3 unit	9 unit	60%	
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan operasional dilingkungan Sekretariat Daerah (minibus, truck, pick up, motor)	93 unit	12 unit	68 unit	68 unit	100%	4 unit	84 unit	90.3%	
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/kantor	Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan rumah jabatan dan kantor	150 unit	17 Unit	90 unit	88 unit	97.77%	45 unit	150 unit	100%	
	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Tersedianya gorden/vitrage, rempel meja makan, sarung kursi, keset kaki, karpet, pot dan bunga plastik, pompa steam mobil, dan trolley minuman, penghias ruangan, peralatan dapur	100 unit	27 unit	50 unit	46 unit	92%	14 unit	87 unit	87%	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Mesin Tik, mesin fotocopy, Mesin penghancur kertas, televisi, podium/mimbar, komputer, printer, scanner, dispenser, proyektor, alat-alat audio visual, sound sistem, alat panggil elektronik, CCTV, Stegger mobile dan GPS	36 unit	23 unit	8 unit	8 unit	100%	0	31 unit	86.11%	

	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya lingkungan rumah jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	48 bulan	80%	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor di lingkungan Sekretariat Daerah	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	48 bulan	80%	
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terlaksananya Service, Suku Cadang dan BBM Kendaraan Dinas KDH, WKDH & Rmh tangga	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	48 bulan	80%	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sekretariat daerah	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	48 bulan	80%	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/dinas di lingkungan Setda	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	48 bulan	80%	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Tersedianya jasa Pemeliharaan peralatan rumah jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretariat Daerah	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	48 bulan	80%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan listrik	Pemeliharaan genset kantor dan rumah jabatan	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	48 bulan	80%	
	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Terpeliharanya lingkungan rumah jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	6 unit	4 unit	2 unit	0	0	0	4	66.66%	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan	Tersedianya kamar set, meja komputer, dispenser, kursi, tv dll	60 paket	33 paket	13 paket	13 paket	100%	13 paket	59 paket	98.33%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tersedianya Peralatan olah raga di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 paket	0	1 paket	1 paket	100%	0	1 paket	100%	
	Pemeliharaan kebersihan rumah jabatan	Terpeliharanya kebersihan rumah jabatan	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	48 bulan	80%	
	Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan jalan Perkantoran Milik Pemerintah Provinsi	Terpeliharanya kebersihan jalan perkantoran Milik Pemerintah Provinsi kepulauan Bangka Belitung	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	48 bulan	80%	
	Rehabilitasi sedang/berat Wisma Bougenvile	Terpeliharanya gedung wisma Bougenvile	1 paket	0	1 paket	0	0	0	0	0	
	Rehabilitasi sedang/berat gedung serba guna	Terpeliharanya gedung serba guna	1 paket	0	1 paket	0	0	0	0	0	
	Kegiatan Publikasi dan Siaran	Terlaksananya kegiatan Publikasi dan Siaran baik melalui Media Cetak, elektronik, dan tersedianya balon gas untuk kegiatan publikasi	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	48 bulan	80%	
	Pembangunan gedung kelengkapan rumah jabatan	Pembangunan gedung kelengkapan rumah jabatan	5 unit	0	5 unit	2 unit	40%	0	2 unit	40%	
1.20.03.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas KDH, WKDH, eselon III dan Humas Protokol	1500 lembar	115 lembar	500 lembar	497 lembar	99.4%	500 lembar	1115 lembar	74.33%	

	Peningkatan Kebugaran Pegawai Pemprov.	Terlaksananya kegiatan senam kesegaran jasmani (jumat) bagi pegawai di lingkungan pemerintah Prov.Kep. Babel	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%	
	Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tersedianya data perencanaan penganggaran responsif gender di Biro Umum Sekretariat Daerah	3 kegiatan	0	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	2 kegiatan	66.66%	
1.20.03.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
	Bimbingan Teknis Implementasi Kehumasan dan Keprotokolan	Tersedianya sumber daya manusia yang terampil	8 kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	2 kegiatan	7 kegiatan	90%	
	Penyusunan Rumpun jabatan fungsional pada SKPD dilingk.Pemprop. Kep. Babel	Tersedianya kompilasi rumpun jabatan fungsional pada seluruh SKPD di lingk. Prop.Kep.Babel sebagai bahan pertimbangan dalam pengangkatan/mutasi pejabat fungsional	2 kali rapat	0	1 kali rapat	1 kali rapat	100%	2 kali rapat	2 kali rapat	100%	
	Penyusunan Peta Jabatan Struktural dan Fungsional Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terwujudnya standarisasi peta dan informasi jabatan struktural dan fungsional pada SKPD dilingk.Pemprop. Kep.Babel	2 kali rapat	0	2 kali rapat	2 kali rapat	66.66%	0	2 kali rapat	100%	

	Kegiatan Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemprov.Kep.Babel (LAKIP)	Jumlah SKPD yang mengimplementasikan SAKIP secara Baik	10 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	8 dokumen	80%	
	Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta	140 peserta	0	40 orang	40 orang	100%	60 orang	100 orang	71.42%	
	Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta	200 peserta	0	100 Peserta	80 orang	80 %	50 orang	150 orang	75%	
	Penyusunan profil aparatur Pemprop Kep. Babel	Tersedianya profil aparatur Pemprop. Kep. Babel	5 x kegiatan	2 x kegiatan	1 x kegiatan	1 x kegiatan	100%	1 kegiatan	4 kegiatan	80%	
	Penyusunan Renstra 2012-2017 Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tersusunnya Revisi renstra Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 - 2017	2 x rapat	0	2 x rapat	2 x rapat	100%	0	2 x rapat	100%	
	Bimtek Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) prop. Kep. Babel	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) tingkat Provinsi dan SKPD Pemprop Kep. Babel	2 x bimtek	1 x bimtek	1 x bimtek	1 x bimtek	100%	0	2 x bimtek	100%	
	Asistensi Pengisian dan Pengumpulan LHKPN dilingk. Pemprop. Kep. Bangka Belitung	terwujudnya penyelenggara Negara yang menaati asas – asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta perbuatan tercela lainnya	1 x rapat	0	1 x rapat	1 x rapat	100%	0	1 x rapat	100%	

	Kegiatan Monev Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Monev Reformasi Birokrasi Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6 x rapat	3 x rapat	3 x rapat	3 x rapat	100%	0	6 x rapat	100%	
	Analisa Jabatan Struktural & fungsional pada dinas & LTD Prop.Kep. Babel	Tersusunnya informasi jabatan struktural dan fungsional pada Dinas dan LTD dilingk.Pemprop. Kep.Babel	1 x rapat	0	1 x rapat	1 x rapat	100%	0	1 x rapat	100%	
	Analisa Jabatan fungsional dan struktural pada Setda, Setwan dan LLD dilingk.Pemprop.Kep babel	Terwujudnya informasi jabatan pada Setda, Setwan dan LLD dilingk,Pemprop.Ke p.Babel	1 x kegiatan	0	1 x kegiatan	1 x kegiatan	100%	0	1 x kegiatan	100%	
	Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Peserta	520 orang	0	300 orang	258 orang	51.6%	60 orang	360 orang	69.23%	
	Pendidikan Khusus Profesi Advokad (PKPA)	Terciptanya SDM yang berkualitas di bidang advokasi	4 orang	0	4 orang	4 orang	100 %	0	4 orang	100%	
1.20.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
	Penyusunan Perencanaan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Tersedianya data-data penyusunan perencanaan dan pelaporan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	75%	

1.06.1.20.0 3.06	Program Pengembangan Data/Informasi										
	Pembangunan Arsip Berbasis Elektronik	Tersedianya Arsip Berbasis Elektronik	1 Aplikasi	0	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	0	1 Aplikasi	100%	
	Informasi Dan Publikasi Bidang Kesejahteraan	Tersedianya informasi dan komunikasi yang akurat dan terpercaya	27 bulan	0	3 bulan	3 bulan	100%	12 bulan	15 bulan	55.55%	
1.07.1.20.0 3.017	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan										
	Fasilitasi Penyelesaian Batas Daerah Antar Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan fasilitasi batas daerah	1 Prov dan 7 Kab/Kota	2 kab/kota	4 kab/kota	4 kab/kota	100%	1 kab/kota	7 kab/kota	100%	
	Inventarisasi Pendataan Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupa Bumi (Unsur Buatan)	Terlaksananya Kegiatan Inventarisasi Pendataan Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupabumi (Unsur Buatan)	2 x inventarisasi	1 x inventarisasi	1 x inventarisasi	1 x inventarisasi	100%	0	2 x inventarisasi	100%	
1.09.1.20.0 3.017	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah										
	Penyediaan jasa penitipan ganti rugi uang pembebasan tanah	terlaksananya pembayaran biaya penitipan ganti rugi uang pembebasan tanah	1 x pembayaran	0	0	0	0	1 x pembayaran	1 x pembayaran	100%	

1.20.03.01 6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH										
	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri	60 bln	24 Bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 Bulan	80%	
	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Terlaksananya kunjungan kerja KDH dan WKDH dalam daerah.	60 bln	24 Bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 Bulan	80%	
	Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi dan Akuntabel	Tersedianya kebijakan - kebijakan Provinsi yang akuntabel	48 bln	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	36 bulan	75%	
	Rapat Koordinasi Gubernur Dengan Bupati Walikota Se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terlaksananya Rapat koordinasi Bidang Pembangunan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	9 x Rakor	3 x rakor	2 x rakor	2 x rakor	100%	2 x rakor	7 x rakor	77.77%	Pemangkasan Anggaran
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Buku LPPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peringkat Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota di Prov. Kep. Babel	175 Buku	70 buku	35 buku	35 buku	100%	35 buku	140 buku	80%	Pemangkasan Anggaran

	Sosialisasi Tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengisian Indikator Kinerja Kunci	Pemahaman aparatur penyusunan LPPD tentang tatacara penyusunan dan pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD	275 orang	110 orang	55 orang	55 orang	100%	55 orang	220 orang	80 %	
	Rapat Koordinasi Gubernur Kepulauan	Terlaksananya pembayaran iuran BKS Tahun 2015 dan Terlaksananya Rapat Koordinasi BKS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1x Iuran BKS dan 1 x Rakor	0	1 x iuran BKS dan 1 x Rakor	1 x Iuran BKS	100 %	0	1 x iuran BKS dan 1 x Rakor	100%	
	Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan Se- Provinsi Kepulauan Bangka	Terlaksananya rapat koordinasi bidang pemerintahan	3 x Rakor Pemerintahan	0	1 x Rakor Pemerintah an	0	0	0	0	0	Tidak diakomodir dalam penyusunan anggaran TA 2016
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyusun LPPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyusun LPPD di Prov. Kep. Babel dan Terselenggaranya Informasi LPPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	8x Media Cetak, 40 Buku	2 Media Cetak, 10 Buku	2 Media Cetak, 10 Buku	2 Media Cetak, 10 Buku	100%	0	4 Media Cetak, 30 Buku	75%	Pemangkasan Anggran
	Sosialisasi Undang - Undang Nomor 30 Tentang Administrasi Pemerintahan		1 x Sosialisasi	0	1xSosialisasi	1 x Sosialisasi	100%	0	1 x Sosialisasi	100%	

1.01.1.20.0 3.20	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kerja										
	Pelaksanaan kegiatan TP UKS Provinsi Kep. Babel	meningkatnya mjt kesehatan di sekolah melalui peningkatan TP UKS	90%	45%	65%	65%	100%	75%	85%	85%	
1.20.03.01 7	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										
	Fasilitasi Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015	Kelancaran penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada satuan kerja	4x Penyerahan DIPA	1 x penyerahan	1 x Penyerahan	1 x Penyerahan	100%	1 x Penyerahan	3 x Penyerahan	75%	Untuk tahun 2017 Pelaksanaan difasilitasi oleh biro umum
	Optimalisasi Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terlaksananya rapat optimalisasi dan pelaksanaan Monev DKTP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	8x Rakor dan 8x Monev di 7 Kab/Kota	2x Rakor dan 2x Monev di 7 Kab/Kota	2x Rakor dan 2x Monev di 7 Kab/Kota	1x Rakor dan 2x Monev di 7 Kab/Kota	75%	0	3 x Rakor dan 4 x Monev di 7 Kab/kota	44%	Tidak diakomodir dalam penyusunan anggaran TA 2016
	Pembinaan Penyusunan Laporan Manajerial	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Tugas Pembantuan	4x Rapat	0	2 x Rapat	2 x Rapat	100%	0	2 x rapat	50%	Tidak diakomodir dalam penyusunan anggaran TA 2016
	Sosialisasi Peraturan Gubernur No.61 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah	Jumlah SDM yang memahami aturan dan kebijakan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	400 orang	160 orang	80 orang	80 orang	100%	0	240 orang	60%	Tidak diakomodir dalam penyusunan anggaran TA 2016

	Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di Prov.Kep.Bangka Belitung										
	Rakor Teknis dan Sinkronisasi Pergub Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara pengelolaan Hibah, Bantuan kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah Lainnya dan BUMD	Terlaksananya Rakor Teknis tentang pengelolaan dan penyaluran bantuan hibah yang efektif, efisien dan akuntabel	1x Rapat Teknis	0	1x Rapat Teknis	1x Rapat Teknis	100%	0	1x Rapat Teknis	100%	
	Monev verifikasi bantuan hibah kepada Pemerintah daerah lainnya dan perusahaan daerah di prov. Kep. Babel	Terlaksananya monev dan verifikasi bantuan dana hibah kepada pemda lainnya dan perusahaan daerah hibah yang efektif, efisien dan akuntabel	10 instansi penerima dana hibah	0	10 instansi penerima dana hibah	5 instansi penerima dana hibah	50%	0	5 instansi penerima dana hibah	50%	Pemangkasan Anggaran
1.20.03.018	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA										
	Pelatihan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Manajemen Kas	terwujudnya pemahaman peserta tentang manajemen kas dan strategi yang harus dilaksanakan oleh pengelola keuangan daerah untuk meningkatkan PAD provinsi dan kab/kota	4 Angkatan	0	2 Angkatan	2 Angkatan	100%	0	2 Angkatan	50%	Tidak diakomodir dalam penyusunan anggaran TA 2016

	Evaluasi Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pengaruhnya terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terlaksananya Pemahaman dan Implementasi UU No. 28 Tahun 2009	1 Angkatan	0	1 Angkatan	1 Angkatan	100%	0	1 Angkatan	100%	
	Penyusunan Database Sumber Pendapatan Daerah Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah buku database sumber pendapatan daerah yang lengkap dan akurat tahun 2013	60 Buku	0	20 buku	20 buku	100%	0	20 buku	33.33%	Tidak diakomodir dalam penyusunan anggaran TA 2016
1.20.03.020	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH										
	Operasional LPSE	Jumlah paket kegiatan yang dilelangkan secara elektronik	1000 paket	400 paket	250 paket	179 paket	71.6%	210 paket	789 paket	78.9%	
	Rakor LPSE	jumlah Peserta	320 orang	65 Orang	55 Orang	50 Orang		55 Orang	165 Orang		
	Sistem Monitoring TEPPA	Laporan kegiatan Monev Sistem Monitoring TEPPA (Sismonetep) kab/kota	40 Eks	10 Eks	10 Eks	10 Eks	100%	10 Eks	30 Eks		
	Pengendalian Pembangunan kegiatan APBD	Jumlah kegiatan pembangunan kegiatan APBD yang dipantau	120 Paket	60 Paket	60 Paket	60 Paket	100%	0	120 Paket	100%	
	Peran Serta masyarakat Jasa Konstruksi	jumlah Peserta	120 Orang	0	40 Orang	40 Orang	100%	40 Orang	80 Orang	66.66%	

	Sinkronisasi Percepatan Pembangunan	Jumlah Peserta	96 Orang	0	32 Orang	32 Orang	100%	32 Orang	64 Orang	66.66%	
	Penyusunan Pergub tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	draft Peraturan Gubernur	150 Buku	0	75 Buku	75 Buku	100%	75 Buku	150 Buku	100%	
	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa antara Pemda (Penguasa) dengan orang/masyarakat secara litigasi dan non litigasi	Jumlah Perkara	10 Perkara	4 perkara	2 Perkara	0	0	1 Perkara	5 Perkara	50%	Di tahun 2015 tidak ada perkara yang disengkatakannya
	Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum serta Kebijakan Pemda	Jumlah Perkara	14 Perkara	5 Perkara	3 Perkara	0	0	1 Perkara	6 Perkara	42.85%	Di tahun 2015 tidak ada perkara yang disengkatakannya
	Bimtek Penyelesaian Sengketa akibat Pelaksanaan Produk Hukum serta Kebijakan Pemda	Jumlah Peserta	280 Orang	100 Orang	60 Orang	60 Orang	100%	60 Orang	240 Orang	85.71%	
1.20.03.023	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI										
	Digitalisasi Pendataan dan Pelaporan	Tersedianya aplikasi pendataan dan pelaporan berbasis IT	1 Aplikasi	0	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	0	1 Aplikasi	100%	
	Pembinaan Petugas SKPD Pelaporan, Sirup, E - Monev dan Penyerapan Anggaran	Terlaksanannya Pelaporan SiRUP dan e-Monev dengan lancar	252 Orang	0	84 Orang	84 Orang	100%	84 Orang	168 Orang	66.66%	

1.20.03.02 5	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH										
	Partisipasi iuran APPSI dan Keikutsertaan Dalam Lokakarya/Rakornas APPSI	Terlaksananya Pembayaran Iuran APPSI	5x Iuran dan 20x Keikutsertaan APPSI	2x Iuran dan 8x Keikutsertaan APPSI	1x Iuran dan 4x Keikutsertaan APPSI	1x Iuran dan 4x Keikutsertaan APPSI	100%	1x Iuran dan 4x Keikutsertaan APPSI	4 x Iuran dan 16 Keikutsertaan APPSI	80%	
	Rakor Kerjasama Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terlaksananya Pertemuan Tim TTKSD Pemerintah Kab/Kota	6x Pertemuan	0	1x Pertemuan	1x Pertemuan	100%	1 x Pertemuan	2 x Pertemuan	33.33%	
	Fasilitasi Optimalisasi penyiapan kesepakatan kerjasama daerah	Jumlah Draf/Dokumen kerjasama yang difasilitasi	15 Dokumen	0	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	0	5 Dokumen	33.33%	Tidak diakomodir dalam penyusunan anggaran TA 2016
	Sosialisasi Kebijakan Kerjasama Luar Negeri	Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi Kebijakan Kerja Sama Luar Negeri	2x Pertemuan	0	1x Pertemuan	1x Pertemuan	100%	0	1 x Pertemuan	50%	Tidak diakomodir dalam penyusunan anggaran TA 2016
	Fasilitasi Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Terlaksananya Pertemuan SKPD Terkait	3x Pertemuan	1x Pertemuan	1x Pertemuan	1x Pertemuan	100%	0	2 x Pertemuan	66.66%	Tidak diakomodir dalam penyusunan anggaran TA 2016
	Pengembangan Kerjasama Pelayanan Publik dan Perbatasan Kab/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pembinaan kerjasama antar daerah	1x Pertemuan dan 6x Monev	0	1x Pertemuan dan 3x Monev	1x Pertemuan dan 3x Monev	100%	0	1x Pertemuan dan 3x Monev	100%	

1.20.03.02 6	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN										
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda	60 Raperda	24 Raperda	12 Raperda	16 Raperda	133%	12 Raperda	52 Raperda	86.66%	
	Bimtek Legal Drafting	Jumlah Peserta	250 Orang	100 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	200 Orang	80%	
	Sosialisasi Perda	Jumlah Perda yang disosialisasikan	200 Orang	50 Orang	80 Orang	80 Orang	100%	50 Orang	180 orang	90%	
	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah PHD yang disusun	6988 PHD	2688 PHD	1344 PHD	2430 PHD	180%	1400 PHD	6518 PHD	93.27%	
	Himpunan Keputusan Gubernur dan Keputusan Sekretaris Daerah	Jumlah Buku	445 Buku	225 Buku	70 Buku	70 Buku	100%	80 Buku	375 buku	84.26%	
	Penyuluhan HAM	Jumlah Peserta	200 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	150 Orang	75%	
	Pengadaan Katalog Perda dan Pergub	Jumlah Buku	390 buku	160 Buku	75 Buku	75 Buku	100%	75 Buku	310 buku	79.48%	
	Himpunan Perda dan Pergub	Jumlah Buku	770 Buku	260 Buku	100 Buku	100 Buku	100%	100 Buku	460 buku	59.74%	
	Penginventarisasian Produk Hukum Pusat	Jumlah Buku	300 buku	0	100 buku	100 buku	100%	0	100 buku	33.33%	
	Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kab/Kota Se Provinsi Kep. Babel	Jumlah Peserta	105 Orang	0	60 Orang	60 Orang	100%	60 Orang	120 Orang	114.28%	
1.20.03.02 7	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU										
	Fasilitasi Penataan Urusan/Kewenangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rapat Fasilitasi Penataan urusan/Kewenangan di Provinsi Kep. Bangka Belitung	10 Angkatan	4 Angkatan	2 Angkatan	2 Angkatan	100%	0	6 Angkatan	60%	Tidak diakomodir dalam penyusunan anggaran TA 2016

1.20.03.04 7	PENINGKATAN PENGAMALAN TERHADAP KEHIDUPAN BERAGAMA										
	Pembinaan dan pemberangkatan kalfah MTQ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	meningkatnya masyarakat dalam minat seni baca dan mempelajari kitab suci Al-Quran	224 Orang	90 Orang	14 Orang	13 orang	92.85%	32 orang	135 orang	60.26%	
	Seleksi STQ/MTQ Prov. Kep. Babel	Seleksi dan Pembinaan Qori/Qoriah melalui STQ/MTQ Prov. Kep. Bangka Belitung	1240 Orang	680 Orang	100 Orang	98 Orang	98%	70 Orang	848 Orang	68.38%	
	Peningkatan kehidupan beragama pada bulan ramadhan	meningkatnya silaturahmi antar sesama muslim/terselenggara safari ramadhan pemprom. Kep. Babel	84 Masjid	28 Masjid	14 Masjid			14 Masjid			
	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan pada hari jumat	peningkatan keimanan dan ketaqwaan pada hari jumat	72 Masjid	0	24 Masjid			24 masjid			
	Penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji/THPD/TKHD/TPIHD prov. Kep. Babel	terselenggaranya pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji/THPD/TKHD/TPIHD prov. Kep. Babel	4565 Orang	1645 Orang	913 Orang	732 Orang	80.17%	732 Orang	3109 Orang	68.09%	
	Pembiayaan biaya domestik jamaah haji prov. Kep. Babel	meningkat jumlah jamaah haji prov. Kep. Babel	4565 Orang	1645 Orang	913 Orang	732 Orang	80.17%	732 Orang	3109 Orang	68.09%	

1.20.03.07 7	PENGEMBANGAN NILAI-NILAI BUDAYA										
	Musyawaharah tokoh adat dan perilaku seni provinsi keulauan bangka belitung	Jumlah peserta yang mengikuti musyawarah tokoh adat, tokoh agama dan pelaku seni	230 Orang	50 Orang	60 Orang	60 Orang	100%	60 Orang	170 Orang	73.91%	
	Festival seni rupa islami Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	meningkatkan perkembangannya dalam melestarikan seni rupa islami dan tradisional provinsi kepulauan bangka belitung	230 Orang	50 Orang	60 Orang	60 Orang	100%	60 Orang	170 Orang	73.91%	
	Peningkatan Kecintaan terhadap budaya islami	meningkatkan perkembangannya dalam melestarikan seni rupa islami dan tradisional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	275 Orang	0	75 Orang	75 Orang	100%	100 Orang	175 Orang	63.63%	
1.20.03.08 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN KECAMATAN, DESA/ KELURAHAN										
	Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Percepatan pelaksanaan PATEN di kabupaten/kota	47 Kecamatan	23 Kecamatan	16 Kecamatan	16 Kecamatan	100%	0	39 Kecamatan	82.97%	Tidak diakomodir dalam penyusunan anggaran TA 2016
	Rapat Koordinasi Camat Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Peningkatan SDM Aparatur Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	297 Orang	47 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	0	147 Orang	49.44%	Tidak diakomodir dalam penyusunan anggaran TA 2016

	Penyusunan Database Administrasi Desa/Kelurahan	Tersedianya database pemerintahan desa/kelurahan yang akurat	97 Buku Database	47 Buku	25 Buku Database	25 Buku Database	100%	0	72 Buku Database	74.22%	Tidak diakomodir dalam penyusunan anggaran TA 2016
	Fasilitasi Penataan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Pemahaman SDM Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan	150 Orang	0	50 Orang	50 Orang	100%	0 Orang	50 Orang	33.33%	Tidak diakomodir dalam penyusunan anggaran TA 2016
	Evaluasi Kinerja Kecamatan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terevaluasinya kinerja kecamatan	12 Kecamatan selama 5 Tahun	6 Kecamatan selama 2 Tahun	3 Kecamatan selama 1 Tahun	3 kecamatan selama 1 tahun	100%	0	9 kecamatan selama 1 tahun	75%	
1.20.03.08 4	PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEPALA DAERAH										
	Bimtek penyusunan perjanjian kinerja (PK) dan LAKIP Provinsi Kep Babel	meningkatnya kualitas penusunan PK dan LAKIP	180 Orang	0	60 Orang	60 Orang	100%	60 orang	120 Orang	66.66%	
1.20.03.09 1	PENGUATAN TATA KELOLA SKPD DALAM RANGKA PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI										
	Monitoring & Evaluasi SOP dilngk. Pemprop. Babel	Memverifikasi pengembangan SOP di lingkungan Pemprop. Kep. Babel	42 SKPD	0	42 SKPD	42 SKPD	100%	0	42 SKPD	100%	
	Penyusunan Standar mutu layanan berbasis ISO	meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil tentang prosedur sistem majemen mutu ISO 9001 : 2008	6 kali rapat (7 samsat dan Unit Pelayanan Publik	0	6 kali rapat (7 samsat dan Unit Pelayanan Publik	6 kali rapat (7 Samsat dan Unit Pelayanan Publik)	100%	0	6 kali rapat (7 Samsat dan Unit Pelayanan Publik)	100%	

	Sosialisasi Laporan harta kekayaan aparat sipil negara dilingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terwujudnya pembangunan integritas aparat sipil negara	43 unit kerja	0	43 unit kerja	43 unit kerja	100%	0	43 unit kerja	100%	
1.20.03.093	PENATAAN KELEMBAGAAN SKPD DALAM RANGKA PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI										
	Fasilitasi penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah diprop.kep.babel	Tersinkronisasinya hubungan antara provinsi dengan kabupaten/kota di bidang organisasi perangkat daerah dalam proses penataan OPD	SKPD Pemprop.Kep. Babel dan Bagian Organisasi Kab/Kota	0	SKPD Pemprop. Kep.Babel dan Bagian Organisasi Kab/Kota	SKPD Pemprop. Kep.Babel dan Bagian Organisasi Kab/Kota	100%	0	SKPD Pemprop.Kep.Babel dan Bagian Organisasi Kab/Kota	100%	
1.20.03.097	KOORDINASI PELAKSANAAN PILPRES PEMILU DPRD DAN PEMILUKADA										
	Fasilitasi Persiapan Pemilukada dan Pelantikan 4 (empat) Bupati/Wakil Bupati	Terwujudnya Monitoring dan Pelantikan KDH dan Wakil KDH serta Anggota DPRD di Prov. Kep. Bangka Belitung	7x Monev dan 24 SK Pengangkatan dan Pemberhentian	4x Monev dan 15 SK Pengangkatan dan Pemberhentian	1x Monev DAN 4 sk Pengangkatan dan Pemberhentian	1x Monev DAN 4 sk Pengangkatan dan Pemberhentian	100%	0	5 x monev dan 19 SK pengangkatan dan pemberhentian	75.30%	
1.10.1.20.03.099	Program Penataan Administrasi Kependudukan										
	Rapat Koordinasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Monev di Kabupaten dan Kota serta Dinas Kependudukan terbaik	16 x Rakor	4 x Rakor	4 x Rakor	4 x Rakor	100%	2 x rakor	10 x rakor	62.5%	

	Fasilitasi Penggunaan Data Kependudukan	Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Rangka Penyerasian Data Kependudukan di Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	14x Rakor	6 x Rakor	3 x Rakor	3 x Rakor	100%	0	9 x rakor	64.75%	Tidak diakomodir dalam penyusunan anggaran TA 2016
	Layanan Media Center Informasi Kependudukan	Teselenggaranya Rakor dan tersedianya perangkat media online (website) informasi kependudukan	4x Rakor dan 1 Perangkat media online (website)	1 x Rakor	1x Rakor dan 1 Perangkat media online (website)	1x Rakor	50 %	0	2 x Rakor	40%	Anggaran dipangkas
	Pendayaan Data Kependudukan	Tersedia buku database kependudukan	500 buku	200 Buku	100 buku	100 buku	100%	60buku	360 buku	72%	Rasionalisasi Anggaran
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Administrasi Kependudukan	Tersedianya Rancangan Perda tentang Administrasi Kependudukan	1 Raperda	0	1 Raperda	1 Raperda	100%	0	1 Raperda	100%	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Pencatatan sipil	Terlaksananya Bimbingan Teknis Bagi SDM Pelayanan Pencatatan Sipil	7x Bimtek	2 x Bimtek	2 x Bimtek	2 x Bimtek	100%	3 kali	7 kali	100%	
	Peningkatan kapasitas Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Bimbingan Teknis Bagi SDM Pelayanan Pencatatan Sipil	4x Bimtek	0	2 x Bimtek	2 x Bimtek	100%	3 x Bimtek	3 x Bimtek	125%	
	Penyusunan Proyeksi Kependudukan	Terlaksananya Bimtek Penyusunan Proyeksi Kependudukan	2 x Bimtek	0	2 x Bimtek	2 x Bimtek	100%	0	2 x Bimtek	100%	

	Sosialisasi Kebijakan Bidang Pencatatan Sipil	Terlaksanannya Sosialisasi Bidang Pencatatan Sipil	9x Sosialisasi	4x Sosialisasi	2 x sosialisasi	2 x Sosialisasi	100%	2 x Sosialisasi	8 x Sosialisasi	88.89%	
	Pengembangan Bank Data Kependudukan	Tersedianya sarana server dan database kependudukan	1 server, 1 database	0	1 server, 1 database	1 server, 1 database	100%	0	1 server, 1 database	100%	
	Penyusunan Data Kelahiran Tingkat Provinsi	Terlaksanannya Workshop dan pelatihan Statistik Kelahiran	4x workshop dan pelatihan	0	2 x Workshop dan Pelatihan	2 x Workshop dan Pelatihan	100%	0	2 x Workshop dan Pelatihan	50 %	Anggaran dipangkas
	Sosialisasi Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Media	Terpasangnya Baliho di 7 Kabupaten/Kota dan Iklan di Media	28 Baliho dan 10 Media	7 Baliho dan 2 Media	7 Baliho dan 2 Media	7 Baliho dan 2 Media	100%	7 Baliho dan 3 Media	21 Baliho dan 7 Media	72.5%	
	Sosialisasi Kebijakan kependudukan	Terlaksanannya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	11 x Sosialisasi	3 x Sosialisasi	3 x Sosialisasi	3 x Sosialisasi	100%	1 x Sosialisasi	7 x Sosialisasi	63%	Anggaran dipangkas
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksanannya Monev di Kabupaten dan Kota serta Dinas Kependudukan terbaik	11x Monev dan 3 Dinas Kependudukan Terbaik	2x Monev dan 3 Dinas Kependudukan Terbaik	3x Monev dan 3 Dinas Kependudukan Terbaik	3x Monev dan 3 Dinas Kependudukan Terbaik	100%	3x Monev dan 3 Dinas Kependudukan Terbaik	8 x Monev	72.72%	
	Penyusunan profil perkembangan kependudukan	terkasananya bimtek penyusunan profil perkembangan kependudukan	2 x bimtek	0	2 x bimtek	2 x bimtek	100%	0	2 x Bimtek	100%	
1.20.03.103	PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI										
	Keikutsertaan Promosi Potensi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Mengikuti Kegiatan Promosi/Expo Skala Nasional dan Internasional	27 x	8 x	7 x	7 x	100%	0	15 x	55.6%	
1.20.03.104	PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI										
	Pemetaan Potensi dan Rapat Koordinasi CSR	tersedianya data program CSR di prov. Kep. Babel	30 buku	0	10 buku	10 buku	100%	0	10 buku	30%	

	Pemantauan dan Koordinasi Masyarakat Pesisir Bidang Kelautan dan Perikanan	Tersedianya Data Perkembangan Kegiatan/Bantuan Bidang Kelautan dan Perikanan	30 buku	0	10 buku	10 buku	100%	0	10 buku	30%	
	Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Rekomendasi (Laporan) Informasi Sembako dan Barang Strategis Lainnya	31 buku	0	11 buku	11 buku	100%	10 buku	21 buku	67.7%	
	Pengendalian dan Pengawasan Penyertaan Modal Prov. Kep. Babel	Laporan Pengendalian dan Pengawasan Penyertaan Modal Prov. Kep. Babel	15 buku	0	5 buku	5 buku	100%	5 buku	10 buku	66.7%	
	Pengawasan Distribusi BBM dan Gas di 7 Kab/Kota Prov. Kep. Babel	Laporan Pengawasan Distribusi BBM dan Gas	15 buku	0	5 buku	5 buku	100%	5 buku	10 buku	66.7%	
1.20.03.10 5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN REPRESIF TERHADAP PRODUK HUKUM KABUPATEN/ KOTA										
	Monitoring dan Kalifikasi Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Buku	240 buku	40 buku	40 buku	40 buku	100%	40 buku	120 buku	50%	
	Evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan RUTR Kab/Kota	Jumlah Raperda	47 Raperda	17 Raperda	10 Raperda	8 Raperda	80%	10 Raperda	35 Raperda	74.46%	

1.20.03.10 6	PROGRAM PELAKSANAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)										
	Pengelolaan dan Pengadaan Fasilitas Pendukung JDIH	Jumlah PHD yang diinformasikan	100%	85%	90%	90%	100%	95%	95%	95%	
1.20.03.10 7	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI										
	Peringatan Patriotisme berbangsa dan bernegara (NKRI)	meningkatnya rasa patriotisme berbangsa bernegara/rangkaian acara HUT RI 17 Agustus 2014	9500 Orang	2500 Orang	2000 orang	2000 Orang	100%	2000 Orang	6500 Orang	68.42%	
	Sinkronisasi dan Implementasi Bidang Kesejahteraan	mengoptimalkan kesepakatan dalam pengimplementasian kegiatan provinsi dengan kab/kota/prov kepabel tercapainya kesejahteraan rakyat	350 Orang	80 orang	40 orang	40 Orang	100%	60 Orang	180 Orang	51.42%	
	Peningkatan Kecintaan bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	meningkatnya kecintaan dan hubungan silaturahmi masyarakat Bangka Belitung melalui HUT Babel/terlaksananya rangkaian acara peringatan HUT Babel	9500 orang	2500 orang	1500 orang	1500 orang	100%	2000 orang	7000 Orang	73.68%	

	Monitoring dan Evaluasi bantuan sosial dan hibah	meningkatnya pelaksanaan monev terhadap bantuan sosial dan hibah 7 Kab/Kota	95%	90%	90%	90%	100%	95%			
	Sosialisasi dan tata cara pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial	terlaksananya pemberian bantuan sosial dan hibah tepat sasaran pada masyarakat	95%	0	80%	80%	100%	85%			
	Kepedulian terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan	peningkatan rasa kepedulian umat terhadap sesama	54 ekor	0	16 ekor	16 ekor	100%	18 ekor	34 ekor	62.96%	
	Penghargaan terhadap pemuda berbakat dan berprestasi se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	meningkatnya pemuda yang berprestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	75 orang	0	33 orang	33 orang	100%	25 orang	58 orang	77.33%	
1.20.03.108	PEMBINAAN MENTAL AKHLAK DAN ETIKA										
	Peningkatan Pengetahuan Keagamaan bagi masyarakat	meningkatnya ketaqwaan pada umat beragama di prov. Kep. Babel	3000 orang	0	3000 orang	3000 orang	100%	0	3000 orang	100%	
1.20.03.109	PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA										
	Pelaksanaan peningkatan kualitas kerukunan umat beragama	meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan internal umat beragama di prov. Kep. Babel	571 orang	208 orang	104 Orang	104 Orang	100%	0	312 orang	54.64%	

1.20.03.09 2	PENINGKATAN DAN PERLUASAN PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI										
	Monitoring & Evaluasi SOP dilingk. Pemprop. Babel	Memverifikasi pengembangan SOP di lingkungan Pemprop. Kep. Babel	1 kali rapat dan 1 x monev	0	1 kali rapat dan 1 x monev	1 kali rapat dan 1 x monev	100%	0	1 kali rapat dan 1 x monev	100%	
	Penyusunan Standar mutu layanan berbasis ISO	mengkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil tentang prosedur sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008	6 kali rapat (7 samsat dan Unit Pelayanan Publik	0	3 kali rapat (7 Samsat dan Unit Pelayanan Publik)	3 kali rapat (7 Samsat dan Unit Pelayanan Publik)	50%	0	3 kali rapat (7 Samsat dan Unit Pelayanan Publik)	50%	
	Sosialisasi Laporan harta kekayaan aparatur sipil negara dilingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terwujudnya pembangunan integritas aparatur sipil negara	43 unit kerj		43 unit kerj	43 unit kerj	100%	0	43 unit kerj	100%	

Tabel III.1

PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

NO	BIRO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	BIRO PEMERINTAH	Belum optimalnya tata kelola administrasi pemerintahan dalam Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah, serta Penyelenggaraan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan lembaga atau instansi lainnya	tata kelola administrasi pemerintahan, Kewilayahan belum baik	Kurangnya koordinasi Biro pemerintahan dengan Pemerintah Kabupaten Kota serta pemangku kepentingan terkait
			Kewenangan Provinsi, Kab/Kota masih tumpang tindih (overlapping)	Belum jelasnya regulasi di tingkat pusat
			Kerjasama yang belum maksimal	Belum jelasnya institusi yang menangani kerjasama pemerintah provinsi dengan pemangku kepentingan
2	BIRO KESRA	Belum optimalnya pelayanan kesejahteraan rakyat	Masyarakat kurang mendapatkan informasi	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat

			Kualitas Kebijakan rendah	kurangnya koordinasi Biro Kesra dengan Perangkat Daerah
3	BIRO HUKUM	Penyelenggaraan dibidang peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum dan informasi hukum yang masih belum harmonis	Masih terdapat inkonsistensi peraturan perundang-undangan	Dinamika perubahan regulasi dari pemerintah yang cepat
			Substansi hukum tidak diketahui masyarakat	Kurangnya penyampain informasi hukum kepada masyarakat
4	BIRO PEREKONOMIAN	Pengendalian dan Penyelenggaraan makro dan mikro ekonomi yang belum optimal	Tata kelola perekonomian daerah belum maksimal	Kurangnya regulasi yang mendukung peningkatan pendapatan daerah
5	BIRO PEMBANGUNAN	Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan administrasi pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Pelaksanaan pembangunan terhambat	Serapan realisasi anggaran tidak tepat waktu
			Data serapan anggaran belum bisa diketahui secara cepat	Belum adanya sistem pengendenda lian yang cepat dan akurat

6	BIRO LAYANAN PENGADAAN	Belum optimalnya proses Pengadaan Barang dan Jasa yang transparan dan akuntabel	Pelaksanaan pengadaan barang jasa tidak tepat waktu, tidak hemat biaya, dan tidak berkualitas	kurangnya kematangan kinerja pengadaan barang/jasa yang memenuhi kriteria timless (tepat waktu), cost saving (Penghematan biaya), kriteria Quality (kualitas baik)
7	BIRO ORGANISASI	Penyelenggaraan tata laksana, kelembagaan serta pengembangan kinerja ASN dan pemerintah daerah yang belum optimal	Pola kerja antar perangkat daerah kurang sistematis	Kurangnya penataan ketatalaksanaan perangkat daerah
			Organisasi perangkat daerah tidak bisa merespon perubahan sesuai dengan tuntutan peran maksimal pemerintah provinsi dalam pembangunan	Kurangnya penataan kelembagaan perangkat daerah
			Masyarakat kurang respon terhadap proses pembangunan	Kurangnya kualitas pelayanan publik
8	BIRO UMUM	Pelaksanaan pelayanan umum dan kesekretariatan yang belum optimal	Kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan terhambat	Kurangnya sarana prasana pendukung penyelenggaraan pemerintahan

9	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	Belum optimalnya pelayanan dalam penyampaian informasi dan dokumentasi kepada publik	Masyarakat tidak mengetahui informasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan	Kurangnya transparansi penyampain informasi publik
---	----------------------------	--	---	--

Tabel III.2
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN SEKRETARIAT
DAERAH
TERHADAP PENCAPAIAN VISI MISI KEPALA DAERAH

MISI	PERMASALAHAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan Demokrasi	Belum optimalnya tata kelola administrasi pemerintahan dalam Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah, serta Penyelenggaraan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan lembaga atau instansi lainnya	tata kelola administrasi pemerintahan, Kewilayahan belum baik	Adanya upaya Menciptakan sinergitas diantara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik
	Belum optimalnya pelayanan kesejahteraan rakyat	Kualitas Kebijakan rendah	Adanya tuntutan dari berbagai pihak terkait atas peningkatan pelayanan yang diberikan
	Penyelenggaraan dibidang peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum dan informasi hukum yang masih belum harmonis	Masih terdapat inkonsistensi peraturan perundang-undangan	1. Tuntutan publik untuk mengembangkan penerapan akuntabilitas kinerja di semua Perangkat Daerah Provinsi untuk mendukung terwujudnya good governance dan clean government. 2. Tuntutan pelaksanaan reformasi regulasi

	Pengendalian dan Penyelenggaraan makro dan mikro ekonomi yang belum optimal	Tata kelola perekonomian daerah belum maksimal	Adanya upaya peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi kewilayahan, mendorong laju investasi, percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, sekaligus mengembangkan potensi unggulan dengan mengakselerasi secara cerdas terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat
	Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan administrasi pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Pelaksanaan pembangunan terhambat	Adanya teknologi (e-monev, tepa) yang semakin maksimal
	Belum optimalnya proses Pengadaan Barang dan Jasa yang transparan dan akuntabel	Pelaksanaan pengadaan barang jasa tidak tepat waktu, tidak hemat biaya, dan tidak berkualitas	Adanya kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan good governance

	Penyelenggaraan tata laksana, kelembagaan serta pengembangan kinerja ASN dan pemerintah daerah yang belum optimal	Pola kerja antar perangkat daerah kurang sistematis	Adanya upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berupa kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja
	Pelaksanaan pelayanan umum dan kesekretariatan yang belum optimal	Kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan terhambat	Adanya tuntutan perbaikan layananan pimpinan, tamu dan peneyediaan sarana prasarana yang lebih baik
	Belum optimalnya pelayanan dalam penyampaian informasi dan dokumentasi kepada publik	Kurangnya transparansi penyampain informasi publik	Tersedianya sarana prasarana teknologi dan informasi yang semakin lengkap dan memadai

Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Tahun 2017- 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
BIRO PEMERINTAHAN								
	Terwujudnya penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintah umum, pembangunan dan pelayanan publik yang tepat	Meningkatnya kualitas dan jumlah kebijakan dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama	Persentase uraian dalam LPPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki capaian kinerja dengan predikat tinggi	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
	Terwujudnya pengkoordinasian administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah yang efisien dan tepat	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien dibidang otonomi daerah, administrasi kwilayahan dan kerjasama	Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyediaan dokumen bagi pemerintah daerah	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %

	Terwujudnya ASN pemerintah provinsi yang profesional dalam memberikan pelayanan	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama	terlaksananya pelayanan administrasi dan penyediaan dokumen bagi pemerintah daerah	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi	Meningkatnya partisipasi publik dalam berdemokrasi dan berpolitik serta kebebasan menyampiakan pendapat/aspirasi		80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
	BIRO KESRA							
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan publik dibidang keagamaan	Persentase fasilitasi bidang keagamaan	75 %	85 %	80 %	85 %	85%
		Meningkatnya pelayanan publik kepada penerima hibah dan bansos	Persentase masyarakat penerima hibah dan bansos yang terbaru	80 %	85 %	90 %	95 %	90 %
		Meningkatnya pelayanan di bidang pendidikan KB, pemuda dan Pariwisata	Persentase perumusan kebijakan dan koordinasi bidang pendidikan KB, pemuda dan pariwisata	70 %	70 %	75 %	80 %	100 %
	BIRO HUKUM							

	Terwujudnya penyusunan kebijakan di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum	Meningkatnya penyusunan kebijakan di bidang produk hukum, peyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum	Persentase kualitas dan kuantitas produk hukum	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
			Persentase pelayanan hukum pemerintah daerah	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
			Persentase publikasi produk hukum	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
BIRO EKONOMI								
	Meningkatnya rekomendasi kebijakan bidang perekonomian	Meningkatnya rekomendasi kebijakan di bidang sumber daya alam	Persentase rekomendasi kebijakan terkait sumber daya alam	80 %	85 %	90 %	95 %	95 %
BIRO PEMBANGUNAN								
	Meningkatnya akuntabilitas penyusunan kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan	Meningkatnya fasilitasi pengendalian kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan	Persentase fasilitasi kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan yang termanfaatkan	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %

BIRO LAYANAN PENGADAAN								
	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah atau negara	Terciptanya pengadaan barang atau jasa yang transparan, akuntabel, terbuka dan kompetitif	Persentase belanja pengadaan melalui e-procurement	90 %	92 %	94 %	96 %	98 %
BIRO ORGANISASI								
	Birokrasi yang bersih dan akurat	Meningkatnya nilai manajemen perubahan	Persentase Peningkatan komitmen pimpinan PD dan pegawai dalam melakukan RB	50 %	53 %	60 %	65 %	68 %
			Persentase pola pikir dan budaya kerja	40 %	44 %	47 %	52 %	56 %
			Persentase menurunnya resiko kegagalan	50 %	53 %	56 %	58 %	62 %
		Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi	Persentase perangkat daerah yang efektif dan efisien)	50 %	54 %	56 %	59%	62 %
		Meningkatnya penataan ketatalaksanaan Pemda	Persentase peningkatan ketatalaksanaan Pemda	55 %	60 %	62 %	64 %	68 %

		Meningkatnya nilai akuntabilitas	Persentase peningkatan nilai laporan kinerja	56 %	60 %	64 %	67 %	70 %
		Meningkatnya kualitas pembinaan pelayanan publik	Index pelayanan publik	50 %	54 %	58 %	62 %	68 %
BIRO UMUM								
	Meningkatnya pelayanan umum dan kesekretariatan Setda	Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan	Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan	62,51	64,46	65,42	66,40	67,40
		Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan	Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan	62,51	64,46	65,42	66,40	67,40
		Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang keuangan	Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang keuangan	62,51	64,46	65,42	66,40	67,40
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL								

	Tercapainya informasi kehumasan dan layanan keprotokolan yang efektif, efisien dan berkualitas	Meningkatnya informasi kehumasan yang diterima oleh publik	Persentase informasi kehumasan yang diterima oleh publik	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya agenda pimpinan daerah yang terlayani	Persentase agenda pimpinan daerah yang terlayani	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel IV.2

INDIKATOR DAN TARGET TUJUAN RENSTRA SETDA TAHUN 2017- 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	REALISASI TAHUN	TARGET					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	BIRO PEMERINTAHAN	Terwujudnya penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintah umum, pembangunan dan pelayanan publik yang tepat	Meningkatnya penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintah umum, pembangunan dan pelayanan publik yang tepat	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	
		Terwujudnya pengkoordinasian administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah yang efisien dan tepat	Meningkatnya pengkoordinasian administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah yang efisien dan tepat	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	

		Terwujudnya ASN pemerintah provinsi yang profesional dalam memberikan pelayanan	Meningkatnya jumlah pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
		Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi	Meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilihan kepala daerah dan legislatif	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
2.	BIRO KESRA	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Nilai rata-rata kepuasan masyarakat	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
3.	BIRO HUKUM	Terwujudnya penyusunan kebijakan di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum serta dokumentasi dan	Persentase kebijakan di bidang produk hukum, pelayanan hukum dan dokumentasi informasi	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %

		informasi hukum							
4.	BIRO EKONOMI	Meningkatnya rekomendasi kebijakan bidang perekonomian	Persentase arah kebijakan perekonomian yang berkualitas	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	95 %
5.	BIRO PEMBANGUNAN	Meningkatnya akuntabilitas penyusunan kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan	Persentase nilai akuntabilitas pengendalian pembangunan	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
6.	BIRO LAYANAN PENGADAAN	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah atau negara	Persentase kematangan kinerja pengadaan barang atau jasa yang memenuhi kondisi timeless (ketepatan waktu), cost saving (penghematan biaya), kwaliti atau kualitas baik dan kepuasan layanan atau IKM	90 %	90 %	92 %	94 %	96 %	98 %

7.	BIRO ORGANISASI	Birokrasi yang bersih dan akurat	Nilai RB Provinsi meningkat	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
8.	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	Tercapainya Informasi Kehumasan dan Layanan Keprotokolan yang Efektif, Efisien dan Berkualitas	Persentase Informasi Kehumasan yang Terpublikasi dan Persentase Kepuasan Keprotokolan	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
9.	BIRO UMUM	Meningkatnya Pelayanan Umum dan Kesekretariatan Setda	Tingkat Kepuasan Pelayanan Umum dan Kesekretariatan Setda	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi			
Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
BIRO PEMERINTAHAN			
Terwujudnya penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintah umum, pembangunan dan	Meningkatnya kualitas dan jumlah kebijakan dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama	Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah , administrasi kewilayahan, dan kerjasama serta mengoptimalkan pengelolaan dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan, dan kerjasama	Meningkatkan kebijakan otonomi daerah , administrasi kewilayahan, dan kerjasama serta Mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah,

pelayanan publik yang tepat			administrasi kewilayahan, dan kerjasama
Terwujudnya pengkoordinasian administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah yang efisien dan tepat	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama		
Terwujudnya ASN pemerintah provinsi yang profesional dalam memberikan pelayanan	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama		

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi	Meningkatnya partisipasi publik dalam berdemokrasi dan berpolitik serta kebebasan menyampikan pendapat/aspirasi		
BIRO KESRA			
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan publik dibidang keagamaan	Meningkatkan kelengkapan bahan penyusun kebijakan dan fasilitasi kesejahteraan rakyat yang tepat sasaran dan Meningkatkan koordinasi dibidang kesejahteraan rakyat	Meningkatkan mutu dalam pelayanan public dan Meningkatkan koordinasi dengan para stakeholder lainnya
	Meningkatnya pelayanan publik kepada penerima hibah dan bansos		
	Meningkatnya pelayanan di bidang pendidikan KB, pemuda dan Pariwisata		

BIRO HUKUM			
Terwujudnya penyusunan kebijakan di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum	Meningkatnya penyusunan kebijakan di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum	Optimalisasi dan sinkronisasi terhadap produk hukum , penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum serta meningkatkan koordinasi bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum	Menyusun produk hukum , penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum berdasarkan azas hukum dan taat prosedur serta meningkatkan mutu produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum

BIRO EKONOMI			
Meningkatnya rekomendasi kebijakan bidang perekonomian	Meningkatnya rekomendasi kebijakan di bidang sumber daya alam	Menyusun rumusan dalam penyelenggaraan rekomendasi kebijakan dibidang administrasi perekonomian serta ,eningkatkan koordinasi penyelenggaraan dan pengendalian indikator ekonomi makro mikro	Melaksanakan pengawasan dan pengembangan dibidang administrasi perekonomian serta mengoptimalkan koordinasi penyelenggaraan dan pengendalian indikator ekonomi makro mikro
BIRO PEMBANGUNAN			
Meningkatnya akuntabilitas penyusunan kebijakan dan	Meningkatnya fasilitasi pengendalian kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan	Meningkatkan ketersediaan bahan pendukung penyusunan kebijakan pembangunan daerah serta meningkatkan keselarasan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dokumen pendukung penyusun kebijakan 2. Optimalisasi dan pengembangan e-

koordinasi bidang pembangunan			<p>monev APBD dan APBN</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dan publik dalam mengakses data dan informasi realisasi serapan anggaran 4. Meningkatkan kualitas koordinasi pembangunan daerah 5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia 6. Meningkatkan pengendalian
-------------------------------	--	--	--

BIRO LAYANAN PENGADAAN			
Terwujudnya efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah atau negara	Terciptanya pengadaan barang atau jasa yang transparan, akuntabel, terbuka dan kompetitif	Meningkatkan kualitas dalam bidang Layanan pengadaan barang/jasa dan pengadaan secara elektronik serta meningkatkan kualitas dalam pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pengadaan secara elektronik	Penguatan kualitas Layanan pengadaan barang/jasa dan pengadaan secara elektronik serta penguatan kualitas pengadaan barang/jasa dan pengadaan secara elektronik
BIRO ORGANISASI			

1. Birokrasi yang bersih dan akurat	Meningkatnya nilai manajemen perubahan	Penataan kebijakan kelembagaan, tatalaksana, analisis jabatan dan kepegawaian, administrasi pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi dan meningkatkan koordinasi dibidang kelembagaan, tatalaksana, analisis jabatan dan kepegawaian , administrasi pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi	Penguatan penataan kebijakan kelembagaan, tatalaksana, analisis jabatan dan kepegawaian, administrasi pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi dan Menciptakan kualitas kebijakan dibidang kelembagaan, tatalaksana, analisis jabatan dan kepegawaian , administrasi pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi
-------------------------------------	--	--	---

	Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi		
	Meningkatnya penataan ketatalaksanaan Pemda		
	Meningkatnya nilai akuntabilitas		
	Meningkatnya kualitas pembinaan pelayanan publik		
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL			
Tercapainya informasi kehumasan dan layanan keprotokolan yang efektif, efisien dan berkualitas	Meningkatnya informasi kehumasan yang diterima oleh publik	Meningkatkan peran kehumasan dan keprotokolan dengan menyusun kebijakan yang lebih baik serta meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan keprotokolan	Memperkuat pelayanan kehumasan dan keprotokolan
	Meningkatnya agenda pimpinan daerah yang terlayani		

BIRO UMUM			
Meningkatnya pelayanan umum dan kesekretariatan Setda	Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan	Meningkatkan kualitas di dalam penyusunan kebijakan yang ditetapkan dibidang rumahtangga, keuangan , dan asetsetda serta meningkatkan koordinasi yang ditetapkan di bidang rumahtangga, keuangan , dan aset setda	Memperkuat pelayanan yang di tetapkan di bidang rumahtangga, keuangan, dan aset setda serta mempermudah dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah
	Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan		
	Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang keuangan		

Tabel VI. 1
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2017-2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		LOKASI
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	100	48.394.471.715	100	50.942.622.648	100	53.489.753.780	100	56.152.741.468	100	58.957.878.540	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan (%)	100	25.427.230.605	100	26.765.505.900	100	28.103.781.195	100	29.508.970.254	100	30.984.418.766	Povinsi, SKPD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (%)	100	18.575.761.110	100	19.553.432.748	100	20.531.104.385	100	21.557.659.604	100	22.635.542.584	Povinsi, SKPD
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya (%)	100	982.720.000	100	1.031.856.000	100	1.083.448.800	100	1.137.621.240	100	1.194.502.302	Povinsi, SKPD
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (Orang)	150	559.400.000	150	600.000.000	150	630.000.000	150	650.000.000	150	680.000.000	Povinsi, SKPD
5	Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Daerah	Prosentase pelayanankedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah (%)	100	2.849.360.000	100	2.991.828.000	100	3.141.419.400	100	3.298.490.370	100	3.463.414.888	Povinsi, SKPD

2	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	Prosentase Koordinasi Kebijakan Perekonomian	100	818.556.850	100	1.306.000.000	100	1.366.000.000	100	1.436.715.000	100	1.504.965.750	
1	Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana Perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah sarana prasarana perekonomian yang representative (Laporan)	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Povinsi, SKPD
2	Monitoring pengawasan supply dan demand barang dan jasa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah data Peredaran barang dan jasa (laporan)	1	0	1	101.000.000	1	101.000.000	1	101.000.000	1	101.000.000	Povinsi, SKPD
3	Monitoring dan Evaluasi Sistem Resi Gudang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase peningkatan harga jual dan stabilnya harga penjualan hasil (%)	100	100.000.000	100	100.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	Povinsi, SKPD
4	Koordinasi Pengawasan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Tim Pengendalian inflasi daerah (Rekomendasi)	5	198.500.000	4	310.000.000	3	320.000.000	2	330.000.000	1	340.000.000	Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
5	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi UKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah data koperasi dan UKM yang aktif di Prov.Kep.Babel (Berkas)	1	0	1	125.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung,

													<i>Belitung Timur, Pangkalpinang</i>
6	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah kerjasama di Prov.Kep.Babel (Laporan)	1	0	1	0	1	0	1	50.715.000	1	100.000.000	<i>Povinsi, SKPD</i>
7	Monitoring dan Evaluasi pengembangan industri hilir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah industri hilirisasi di Prov.Kep.Babel (Laporan)	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	<i>Povinsi, SKPD</i>
8	Monitoring,Evaluasi Promosi potensi daerah (EXPO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Laporan Pengembangan Destinasi Wisata Baru (Laporan)	1	117.856.050	1	220.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	<i>Povinsi, SKPD, Belitung</i>
9	Monitoring dan Evaluasi Analisis Ekonomi Makro di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Analisis Makro Ekonomi (Rekomendasi)	2	117.100.800	2	140.000.000	2	140.000.000	2	140.000.000	2	138.965.750	<i>Luar Daerah,Provinsi, SKPD, Bangka Barat,Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang</i>
10	Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah UMKM yang aktif di Prov.Kep.Babel (Laporan)	1	166.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	<i>Povinsi, SKPD</i>
11	Forum Pengembangan Ekonomi	Jumlah laporan antara OPD Provinsi, Kab/Kota (Laporan)	1	119.100.000	1	210.000.000	1	220.000.000	1	230.000.000	1	240.000.00	<i>Luar Daerah,Provinsi, SKPD, Bangka Barat,Bangka Selatan, Bangka Tengah,</i>

													Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpina ng
3	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	100	644.924.775	100	882.500.000	100	916.625.000	100	952.456.250	100	990.079.063	
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Distribusi Penggunaan Subsidi listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rasio Jumlah Rekomendasi bidang energi dengan Rekomendasi yang ditindaklanjuti (Dokumen)	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Povinsi, SKPD
2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah masyarakat penerima Gas Elpiji 3Kg dan BBM (Laporan)	1	153.324.000	1	162.500.000	1	162.500.000	1	162.500.000	1	162.500.000	Luar Daerah, Provi nsi, SKPD, Bangka Barat, Bangk a Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpina ng
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penataan serta Pengembangan Lahan Kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Kebijakan kerjasama investasi pertambangan (Laporan)	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.125.000	1	135.956.250	1	100.000.000	Povinsi, SKPD
4	Monitoring dan evaluasi Perizinan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase peningkatan pengawasan AMDAL (%)	100	50.000.000	100	70.000.000	100	104.000.000	100	104.000.000	100	104.000.000	Povinsi, SKPD

5	Kajian Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Fungsi Balai Benih Pertanian, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang pertanian yang dikeluarkan dengan yang ditindaklanjuti (Dokumen)	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Povinsi, SKPD
6	Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Komoditi Pangan	Jumlah Laporan Komoditi Pangan (Laporan)	1	137.765.700	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
7	Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	jumlah potensi energi baru terbarukan (laporan)	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Povinsi, SKPD
8	Monitoring dan Evaluasi Tim Terpadu Penanganan masalah Penambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi dan kerjasama antar tim terpadu penanganan masalah pertambangan timah (Rekomendasi)	4	203.835.075	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
9	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi komoditi lada di Prov. Kep. Babel	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pertanian yang dikeluarkan	1	0	1	0	1	0	1	0	1	73.579.063	Povinsi, SKPD

		dengan yang ditindaklanjuti (laporan)											
10	Koordinasi Pemerataan dan percepatan penggunaan energi alternatif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	jumlah potensi energi alternatif (laporan)	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Povinsi, SKPD
4	Program Peningkatan Koordinasi Bumd, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya	Prosentase Koordinasi Kebijakan BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya	100	2.350.877.200	100	3.260.000.000	100	2.200.000.000	100	2.350.000.000	100	2.640.000.000	
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi kajian potensi investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Data potensi investasi Babel (laporan)	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Povinsi, SKPD
2	Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung	Jumlah dokumen Pembentukan bank umum syariah Bangka Belitung (Dokumen)	1	762.011.400	1	1.500.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
3	Koordinasi Program CSR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi/Kesepakatan Program CSR di Provinsi (Kesepakatan)	3	117.100.800	3	150.000.000	3	200.000.000	3	210.000.000	3	220.000.000	Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur,

													<i>Pangkalpinang</i>
4	Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Laporan)	1	100.000.000	1	120.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	1	100.000.000	<i>Luar Daerah, Povinsi, SKPD, Bangka, Belitung</i>
5	Penyusunan Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah data Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata (Dokumen)	7	300.000.000	7	320.000.000	7	340.000.000	7	360.000.000	7	380.000.000	<i>Povinsi, SKPD</i>
6	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kajian dan Penyusunan Perlindungan Benda Cagar Budaya atau Benda diduga cagar budaya	Jumlah benda cagar budaya atau benda diduga caga budaya (dokumen)	7	300.000.000	7	320.000.000	7	340.000.000	7	360.000.000	7	380.000.000	<i>Povinsi, SKPD</i>
7	Kajian Strategis Destinasi Wisata Baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan pengembangan destinasi wisata baru (Laporan)	1	100.000.000	1	120.000.000	1	140.000.000	1	160.000.000	1	180.000.000	<i>Luar Daerah,Provinsi, SKPD, Bangka Barat,Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang</i>
8	Rakor Teknis Tata Kelola BUMD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen tata laksana BUMD se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berkas)	1	99.100.000	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	480.000.000	<i>Luar Daerah,Provinsi, SKPD, Bangka Barat,Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka,</i>

													<i>Belitung, Belitung Timur, Pangkalpina ng</i>
9	Penyusunan SOP BUMD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah data SOP (dokumen)	7	349.845.000	7	350.000.000	7	360.000.000	7	370.000.000	7	380.000.000	<i>Povinsi, SKPD</i>
10	Pemetaan Potensi Investasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah data potensi investasi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dokumen)	7	222.820.000	7	230.000.000	7	240.000.000	7	250.000.000	7	270.000.000	<i>Povinsi, SKPD</i>
5	Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN	Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Penyelenggaraan Dana APBN di Provinsi dan Kabupaten/Kota	75	475.514.731	80	1.407.072.623	85	1.208.633.140	90	1.705.575.913	95	1.817.671.421	
1	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sistem e-Monev APBN	Jumlah Aplikasi e-Monev APBN (Aplikasi)	1	257.308.000	1	436.643.000	1	429.852.588	1	494.330.476	1	568.480.047	<i>Luar Daerah,Provi nsi, SKPD, Bangka Barat,Bangk a Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpina ng</i>
2	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan yang bersumber dari APBN	Jumlah Laporan (Laporan)	2	161.256.731	2	243.864.764	2	280.444.479	2	322.511.150	2	370.887.823	<i>Pangkalpina ng</i>
3	Koordinasi Kebijakan APBN	Rekomendasi Evaluasi APBN (Rekomendasi)	1	56.950.000	1	161.200.000	1	185.380.000	1	213.187.000	1	245.165.050	<i>Provinsi</i>
4	Penyusunan Pergub / Revisi Pergub tentang	Jumlah Peraturan Gubernur (Pergub)	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0	1	150.000.000	<i>Provinsi</i>

	Pengendalian Dana APBN												
5	Penyusunan Kebijakan Implementasi Jaringan Aplikasi E-Monev APBN	Jumlah Dokumen Kebijakan (Dokumen)	0	0	1	165.000.000	0	0	0	0	0	0	Pangkalpinang
6	Pemuthahiran Aplikasi E-Monev APBN	Jumlah Aplikasi E-Monev APBN (Aplikasi)	0	0	0	0	0	0	1	300.000.000	0	0	Pangkalpinang
7	Penggunaan Aplikasi E-Monev APBN	Jumlah SDM yang memahami Aplikasi (Orang)	0	0	50	250.364.859	50	312.956.073	50	375.547.287	50	483.138.501	Pangkalpinang
6	Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	77.460.000	5.385.583.757	81.000.000	700.574.000	85.000.000	5.735.910.000	89.500.000	772.570.000	94.500.000	5.810.778.000	
		Persentase bidang tanah pemerintah provinsi yang bersertifikat	30		30		40		0		0		
		persentase kasus sengketa batas wilayah administrasi yang diselesaikan	20		40		60		80		100		
1	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Sengketa Pertanahan di kabupaten/kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	terlaksananya monitoring dan evaluasi pengaduan sengketa pertanahan di kabupaten/kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (pengaduan)	6	0	6	81.300.000	6	85.300.000	6	89.500.000	6	93.978.000	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
2	Kegiatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung	terlaksananya proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	30	108.400.000	9	118.345.000	6	124.260.000	3	130.470.000	3	136.900.000	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung,

		sebanyak 30 bidang (Bidang)											<i>Belitung Timur, Pangkalpinang</i>
3	Kegiatan Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah penyelesaian sengketa batas daerah antar Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sengketa batas administrasi wilayah)	1	59.244.500	1	108.129.000	1	113.500.000	1	119.100.000	1	125.000.000	<i>Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang</i>
4	Kegiatan Inventarisasi Pendataan, Penamaan, Dan Pembakuan Unsur Rupabumi (unsur buatan)	Jumlah Kabupaten yang terinventarisir (Kabupaten)	6	124.370.500	0	157.000.000	0	165.300.000	0	173.600.000	0	182.000.000	<i>Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang</i>
5	Kegiatan Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas daerah	Jumlah segmen batas daerah yang diinventarisir dan dipelihara (segmen batas)	6	48.806.282	30	105.000.000	30	110.250.000	30	115.750.000	30	121.550.000	<i>Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang</i>
6	Kegiatan Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah pilar batas daerah yang terpasang (pilar batas)	5	94.762.475	10	130.800.000	10	137.300.000	10	144.150.000	10	151.350.000	<i>Provinsi, Belitung Timur, Belitung</i>

7	Pengadaan Lahan	Jumlah Lahan yang tersedia (ha)	40	4.950.000.000	0	0	30	5.000.000.000	0	0	25	5.000.000.000	Provinsi
7	Program Pengembangan Otonomi Daerah	Peringkat penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi	15	1.448.652.830	13	2.638.074.000	11	2.772.705.000	10	2.888.104.750	9	3.312.582.000	
		Persentase kebijakan yang diterbitkan dalam rangka harmonisasi dan efektifnya pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan	10		15		20		25		30		
		Jumlah kepala daerah dan anggota legislative yang terfasilitasi secara administrasi	20		20		20		20		20		
		Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan-layanan publik	90		90		90		100		100		
1	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Tersusunnya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) (Dokumen)	1	165.953.745	1	327.905.000	1	347.905.000	1	367.905.000	2	650.000.000	Provinsi
2	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kunci, serta Informasi Laporan Penyelenggaraan	Tersusunnya dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) (dokumen)	1	351.810.000	1	367.500.000	1	386.500.000	1	400.000.000	1	420.000.000	Provinsi, SKPD

	Pemerintahan Daerah Tahun 2017												
3	Penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tersusunnya dokumen EKPPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung (dokumen)	7	276.971.408	7	467.000.000	7	490.000.000	7	514.000.000	7	539.000.000	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
4	Kegiatan Desk Pilkada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi pelaksanaan Pilkada Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung (Provinsi/Kabupaten/Kota)	3	143.257.000	0	262.500.000	4	275.100.000	0	288.855.000	4	303.297.000	Provinsi, Bangka, Belitung, Pangkalpinang
5	Kegiatan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan KDH dan WKDH	Terselenggaranya Pelantikan KDH dan WKDH Provinsi/Kabupaten/Kota (kali)	3	116.415.704	0	210.000.000	4	220.000.000	0	213.000.000	4	242.500.000	Provinsi
6	Kegiatan Implementasi Proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota	Jumlah SK PAW anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota . (surat keputusan)	0	0	5	157.000.000	5	165.375.000	5	173.643.750	5	182.325.000	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
7	Pelayanan Perizinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta	Jumlah izin keluar negeri yang	10	74.753.565	10	157.000.000	10	165.375.000	10	173.643.000	10	182.300.000	Provinsi

	Ketua/Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung ke Luar Negeri	dikeluarkan (surat izin)											
8	Rapat koordinasi optimalisasi penyelenggaraan urusan/kewenangan dan kebijakan Otonomi Daerah di Prov. Kep. Bangka Belitung	Terlaksananya rapat penyelenggaraan urusan/kewenangan dan kebijakan otonomi daerah di Provinsi Kep, Bangka Belitung (kali)	1	116.015.704	1	229.587.000	1	241.100.000	1	253.155.000	1	265.800.000	Provinsi
9	Rapat koordinasi penerapan pelaksanaan NSPK di Prov. Kep. Bangka Belitung	terlaksananya rapat koordinasi mengenai penerapan NSPK di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (kali)	1	101.165.704	1	229.582.000	1	241.100.000	1	253.153.000	1	265.810.000	Provinsi
		Jumlah peserta rakor (orang)	50		50		50		50		50		Provinsi
10	Kegiatan perencanaan, evaluasi dan penyusunan laporan internal Biro Pemerintahan	Tersusunnya dokumen perencanaan, laporan internal Biro Pemerintahan dan evaluasi. (Dokumen)	0	0	6	105.000.000	6	110.250.000	6	115.750.000	6	121.550.000	SKPD
11	Workshop Penataan dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	workshop penataan dan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah (kali)	1	102.310.000	1	125.000.000	1	130.000.000	1	135.000.000	1	140.000.000	Provinsi
8	Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah	Meningkatnya koordinasi hubungan kepala daerah di Prov.	90	1.639.284.704	90	1.665.551.000	90	1.726.311.000	90	1.658.520.000	100	1.718.929.000	

		Kep. Bangka Belitung											
		Meningkatnya jumlah kerjasama antar pemerintah daerah, swasta dan luar negeri	90		90		90		90		100		
1	Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terlaksananya Rapat Koordinasi antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kali)	2	220.949.000	2	382.389.000	2	401.508.000	2	421.580.000	2	442.650.000	Provinsi
2	Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakernas APPSI	Terlaksananya keikutsertaan Provinsi dalam APPSI (Kali)	1	101.320.000	1	230.464.000	1	241.980.000	1	254.080.000	1	266.780.000	SKPD
3	Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan	Terlaksananya keikutsertaan dalam BKS Provinsi Kepulauan (Kali)	1	137.765.704	1	260.284.000	1	273.290.000	1	286.960.000	1	301.305.000	SKPD
4	Kegiatan Verifikasi dan Validasi bantuan pemerintah provinsi kepada Pemerintah/pemerintahan daerah lainnya dan BUMD	Jumlah proposal bantuan hibah yang diverifikasi (proposal bantuan)	0	0	4	78.629.000	4	82.560.000	4	86.688.000	4	91.022.000	Provinsi
5	Kegiatan Pengembangan Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama	jumlah rekomendasi kerjasama/perjanjian (rekomendasi)	8	197.400.000	10	144.411.000	10	151.631.000	10	159.212.000	10	167.172.000	Provinsi
6	Kegiatan Inventarisasi potensi kerjasama	Prosentase Terlaksananya inventarisasi potensi daerah yang dapat dikerjasamakan oleh perangkat daerah (%)	100	93.150.000	100	119.374.000	100	125.342.000	100	0	100	0	Provinsi

7	Kegiatan Penyelaras program pemerintah daerah dan pusat	Pelaksanaan penyelaras program pemerintah daerah dan pusat (kali pertemuan)	4	888.700.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	Provinsi
9	Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan	Prosentase pembinaan keagamaan	100	8.394.550.000	100	12.728.933.000	100	11.595.068.000	100	11.995.068.000	100	12.395.068.000	
1	Pembinaan Mental dan Spritual Masyarakat provinsi Kep.Bangka Belitung	persentase pembinaan masyarakat (%)	80	1.335.332.000	80	1.502.648.000	80	1.552.648.000	80	1.602.648.000	80	1.652.648.000	Provinsi
2	Peningkatan Kehidupan Beragama pada Bulan Ramadhan	Frekuensi Peyelenggaraan Safari Ramadhan (Masjid)	17	616.530.000	17	675.100.000	17	725.100.000	17	775.100.000	17	825.100.000	Provinsi
3	Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji	Jumlah Jamaah haji yang diberangkatan (jemaah/orang)	1.100	903.270.000	1.100	998.600.000	1.100	1.048.600.000	1.100	1.098.600.000	1.100	1.148.600.000	Provinsi
4	Pendampingan Jamaah Haji Prov. Kep. Bangka Belitung	Terseleksinya Petugas Haji Daerah TPHD/TKHD (orang)	7	488.088.000	7	554.080.000	7	604.080.000	7	654.080.000	7	704.080.000	Provinsi
5	Pembiayaan Transportasi Domestik Jamaah Haji	Jumlah Jamaah yang Terfasilitasi Biaya Domestik Haji (orang)	1.100	3.170.920.000	1.100	3.250.000.000	1.100	3.300.000.000	1.100	3.350.000.000	1.100	3.400.000.000	Provinsi
6	Persiapan Musabaqah Hafidz Qur'an Internasional	Jumlah Penyelenggaraan Hafidz Qur (Kali)	1	500.000.000	1	2.372.040.000	1	2.422.040.000	1	2.472.040.000	1	2.522.040.000	Luar Daerah
7	Pembinaan dan Pemberangkatan Khafilah STQ Nasional	Jumlah Khafilah yang mengikuti STQ (orang)	30	1.380.410.000	30	1.506.600.000	30	1.556.600.000	30	1.606.600.000	30	1.656.600.000	Pangkalpinang
8	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Jumlah yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (orang)	50	0	50	336.000.000	50	386.000.000	50	436.000.000	50	486.000.000	Bangka Barat
9	Pekan Olah Raga dan Seni antar Pondok Pesantren Tingkat Daerah Prov. Kep. Babel			0		534.965.000		0		0		0	Provinsi, SKPD

10	Pembinaan dan Pemberangkatan Kontingen POSPENAS			0		998.900.000		0		0		0	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
10	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Pemuda dan Pariwisata	prosentase pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata	100	1.323.400.000	100	2.010.920.000	100	2.160.920.000	100	2.310.920.000	100	2.460.920.000	
1	Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Sekolah yang dinilai (sekolah)	28	297.820.000	28	384.090.000	28	434.090.000	28	484.090.000	28	534.090.000	Provinsi
2	Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Partisipasi Acara HUT Bangka Belitung (orang)	3.000	1.025.580.000	3.000	1.096.630.000	3.000	1.146.630.000	3.000	1.196.630.000	3.000	1.246.630.000	Provinsi
3	Koordinasi Bidang Pendidikan, KB, Pemuda dan Pariwisata	Jumlah Rekomendasi yang dicapai (Rekomendasi)	21	0	21	530.200.000	21	580.200.000	21	630.200.000	21	680.200.000	Provinsi
11	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Prosentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi	100	535.189.000	100	1.067.422.000	100	1.217.422.000	100	1.317.422.000	100	1.567.422.000	
1	Rapat Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	terlaksannya pelayanan yang optimal kepada masyarakat (Rekomendasi)	21	0	21	430.233.000	21	480.233.000	21	530.233.000	21	580.233.000	Provinsi
2	Monitoring dan evaluasi dana bantuan sosial dan hibah	Meningkatnya kegiatan monitoring dan evaluasi bansos dan hibah (Proposal)	200	333.985.000	200	383.985.000	200	433.985.000	200	533.985.000	200	583.985.000	Provinsi
3	Evaluasi dan Analisa Proposal Bansos dan Hibah	Terlaksananya Evaluasi dan Analisis Proposal Bansos dan Hibah (proposal)	500	201.204.000	500	253.204.000	500	303.204.000	500	253.204.000	500	403.204.000	Provinsi

12	Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penataan Peraturan Perundang-undangan	80	1.912.323.600	85	3.420.000.000	90	3.710.000.000	95	3.970.000.000	100	4.215.000.000	
1	Penyusunan Propemperda Dan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Usulan Propemperda yang selesai disusun (Usulan Propemperda)	1	959.843.600	1	1.500.000.000	1	1.550.000.000	1	1.600.000.000	1	1.650.000.000	Provinsi
		Jumlah Raperda yang selesai disusun (Raperda)	10		10		12		12		12		Provinsi
2	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang selesai disusun (Pergub)	70	567.480.000	70	500.000.000	70	600.000.000	70	700.000.000	70	800.000.000	Provinsi
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang selesai disusun (Kepgub)	900		900		900		900		900		Provinsi
3	Penyusunan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Naskah Hukum Lainnya yang selesai disusun (NHL)	100	67.220.000	100	150.000.000	100	170.000.000	100	180.000.000	100	190.000.000	Provinsi
4	Pembinaan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan PHD Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan Teknis (Rancangan PHD)	20	0	25	420.000.000	30	440.000.000	35	460.000.000	40	480.000.000	Provinsi
5	Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda Kabupaten/Kota yang Selesai dievaluasi (Raperda)	10	317.780.000	10	400.000.000	10	430.000.000	10	450.000.000	10	460.000.000	Provinsi
6	Simplifikasi Regulasi Produk Hukum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang telah dilakukan simplifikasi (PHD)	0	0	35	160.000.000	40	180.000.000	45	190.000.000	50	215.000.000	Provinsi
7	Rapat Koordinasi Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Rekomendasi (Rekomendasi)	0	0	1	140.000.000	1	170.000.000	1	200.000.000	1	210.000.000	Provinsi

8	Bimbingan Teknis Legal Drafting	Jumlah Aparatur yang memahami Penyusunan PHD (Orang)	0	0	50	150.000.000	55	170.000.000	60	190.000.000	65	210.000.000	Provinsi
13	Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Hukum	80	955.806.626	85	1.816.000.000	90	1.970.046.250	95	2.121.045.000	100	2.295.300.438	
1	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Perdata antara Pemda dengan Orang/Masyarakat secara Litigasi atau Non Litigasi	Jumlah Kasus Sengketa Perdata yang Melalui Tahapan Proses Penyelesaian (Kasus)	1	170.370.000	1	300.000.000	1	320.000.000	1	340.000.000	1	355.000.000	Provinsi
2	Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda	Jumlah Kasus Sengketa TUN yang Melalui Tahapan Proses Penyelesaian (Kasus)	1	191.528.000	1	300.000.000	1	320.000.000	1	330.000.000	1	350.000.000	Provinsi
3	Pembinaan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Akibat Pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Pemda di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Laporan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Kabupaten/Kota (Laporan)	1	93.865.626	1	150.000.000	1	170.000.000	1	190.000.000	1	220.000.000	Provinsi
4	Pembinaan Pelaksanaan RANHAM di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi dan Kab/Kota (Laporan)	1	94.444.000	1	210.000.000	1	240.000.000	1	270.000.000	1	300.000.000	Provinsi
5	Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Masyarakat Miskin yang diberikan Bantuan Hukum (Orang)	40	156.966.000	40	230.000.000	45	260.000.000	50	290.000.000	55	320.000.000	Provinsi
6	Penyuluhan Hukum di 7 Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang diberikan Penyuluhan Hukum (Orang)	200	248.633.000	350	350.000.000	350	370.000.000	350	390.000.000	350	420.000.000	Provinsi

7	Penyuluhan HAM	Terlaksananya Penyuluhan HAM (Orang)	80	0	80	136.000.000	80	140.046.250	80	151.045.000	80	160.300.438	Provinsi
8	Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemerintah Daerah	Jumlah aparatur yang memahami penyelesaian sengketa akibat pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda (Orang)	0	0	40	140.000.000	50	150.000.000	60	160.000.000	70	170.000.000	Provinsi
14	Program Pengembangan Dokumentasi Hukum Dan Informasi Hukum	Persentase Pengembangan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum	80	750.391.500	85	1.510.000.000	90	1.670.000.000	95	1.830.000.000	100	2.000.000.000	
1	Pengelolaan dan Pengembangan JDIH	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dipublikasi melalui Website JDIH (Peraturan Perundang-undangan)	75	482.138.000	95	600.000.000	100	650.000.000	110	700.000.000	120	750.000.000	Provinsi
		Jumlah Artike yang dipublikasikan melalui website JDIH (Artikel)	120		120		120		120		120		Provinsi
2	Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Hukum (Buku)	Jumah Buku Perpustakaan Hukum (Buku)	50	61.658.000	50	85.000.000	50	90.000.000	50	95.000.000	50	100.000.000	Provinsi
		Jumlah Rak (Rak)	3		1		1		1		1		Provinsi
3	Penyusunan Katalog Perda dan Pergub dan Kompilasi Perda dan Pergub	Jumlah Buku Katalog dan Kompilasi Perda/Pegub yang tersedia (Buku)	120	69.125.500	150	85.000.000	150	90.000.000	200	95.000.000	200	100.000.000	Provinsi
4	Penyusunan Abstar Produk Hukum Daerah	Jumlah Buku Abstrak PHD yang disusun (Buku)	0	0	100	120.000.000	100	140.000.000	100	160.000.000	100	180.000.000	Provinsi
5	Penyusunan Arsip Produk Hukum Daerah	Jumlah PHD yang diarsipkan (PHD)	0	0	500	85.000.000	550	90.000.000	600	100.000.000	600	110.000.000	Provinsi

6	Pembinaan Pelaksanaan JDIH Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan JDIH Kabupaten/Kota (Kab/Kota)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Provinsi
7	Sosialisasi Perda	Jumlah Perda yang di sosialisasikan (Perda)	0	0	6	95.000.000	6	110.000.000	6	120.000.000	6	130.000.000	Provinsi
8	Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Pembangunan di Bidang Hukum yang tersusun (Rakor)	1	137.470.000	1	170.000.000	1	190.000.000	1	210.000.000	1	230.000.000	Provinsi
9	Publikasi Produk Hukum Daerah di Media	Tersampainya PHD Prov. Kep.Bangka Belitung Kepada Masyarakat Umum (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Provinsi
10	Bimtek Sistem Informasi Hukum	Jumlah Aparatur yang memahami Teknis Sistem Informasi Hukum (Orang)	0	0	40	140.000.000	40	160.000.000	40	180.000.000	40	200.000.000	Provinsi
11	Rakor JDIH Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi yang disusun (Rekomendasi)	0	0	1	130.000.000	1	150.000.000	1	170.000.000	1	200.000.000	Provinsi
15	Program Perencanaan Setda	Persentase Dokumen Keuangan dan Laporan Kinerja meningkat	75	301.467.968	80	428.313.000	85	492.559.950	90	566.443.943	95	651.410.534	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)	3	149.599.950	3	202.610.000	3	233.001.500	3	267.951.725	3	308.144.484	Provinsi
2	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan (Laporan)	4	151.868.018	4	225.703.000	4	259.558.450	4	298.492.218	4	343.266.050	Provinsi
16	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik	92	779.993.020	95	1.549.651.606	97	1.780.849.347	98	2.042.976.749	100	2.340.673.261	

		Penyelenggaraan Dana APBD di Provinsi dan Kabupaten/Kota											
1	Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota (Laporan)	1	108.080.000	1	380.450.000	1	437.517.500	1	503.145.125	1	578.616.894	Provinsi, Belitung Timur, Pangkalpinang
2	Peningkatan Fungsi Sistem Monitoring TEPR (SISMONTEP) Provinsi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Sistem Monitoring TEPR (SISMONTEP) Provinsi Kabupaten/Kota (Laporan)	4	578.951.855	4	662.436.606	4	761.802.097	4	876.072.411	4	1.007.483.273	Provinsi
3	Peningkatan Pengendalian Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Kesepakatan Rencana Tindak Lanjut (RTL) (Dokumen)	1	92.961.165	1	331.765.000	1	381.529.750	1	438.759.213	1	504.573.094	Provinsi
4	Koordinasi Penetapan Target Fisik dan Keuangan APBD Provinsi	Jumlah Dokumen Laporan Penetapan Target Fisik dan Keuangan APBD Provinsi (Dokumen Laporan)	1	0	1	175.000.000	1	200.000.000	1	225.000.000	1	250.000.000	Provinsi
17	Program Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Apbd	Persentase Realisasi Program dan Kegiatan APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	80	501.326.670	85	1.982.884.194	90	1.959.232.094	95	1.566.143.954	100	1.728.216.318	
1	Peningkatan Fungsi Sistem E-Monev APBD	Jumlah Laporan Koordinasi Sistem E-Monev (Laporan)	1	0	1	602.328.194	1	627.328.194	1	652.328.194	1	677.328.194	Pangkalpinang
2	Koordinasi Penyempurnaan	Jumlah Aplikasi e-Monev APBD yang	1	398.674.000	1	538.326.000	1	619.074.900	1	711.936.135	1	818.726.555	Pangkalpinang

	Aplikasi e-Monev APBD	disempurnakan (Aplikasi)											
3	Kebijakan Monitoring Evaluasi APBD	Jumlah Dokumen Laporan Kebijakan Monitoring (Dokumen Laporan)	1	102.652.670	1	152.650.000	1	175.547.500	1	201.879.625	1	232.161.569	Pangkalpinang
4	Penyusunan Kebijakan dan Implementasi Jaringan Aplikasi e-Monev berkelanjutan	Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan (Rekomendasi)	0	0	0	0	1	250.000.000	0	0	0	0	Pangkalpinang
5	Penggunaan Aplikasi E-Monev APBD	Jumlah SDM yang memahami Aplikasi (Orang)	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	Pangkalpinang
6	Peningkatan Capaian Realisasi APBD	Rekomendasi APBD (Rekomendasi)	0	0	1	225.620.000	1	0	1	0	1	0	Pangkalpinang
7	Peningkatan Fungsi Sismontepra APBD Provinsi, Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi dan Laporan (laporan)	0	0	1	463.960.000	1	287.281.500	0	0	0	0	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
18	Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan	Persentase data dan informasi pengadaan barang/jasa yang dikelola dan dipublikasikan berbasis IT	90	554.899.000	92	1.446.989.500	94	1.591.688.450	96	1.750.857.295	98	1.925.943.025	
		Survey kepuasan masyarakat terhadap pengembangan data informasi layanan pengadaan	80		80		80		80		80		

1	Peningkatan penerapan data dan informasi layanan	Jumlah Penerapan aplikasi sistem pengelolaan informasi Pengadaan barang/jasa (Aplikasi)	1	211.370.000	1	533.841.000	1	587.225.100	1	645.947.610	1	710.542.371	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
2	Pengelolaan data dan informasi	Jumlah Admin OPD Sistem Informasi Pengadaan (Admin OPD)	42	125.128.000	42	259.050.000	42	284.955.000	42	313.450.500	42	344.795.550	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
3	Peningkatan Administrasi Ketatausahaan	Jumlah Dokumen dukungan data perencanaan, pelaporan dan ketatausahaan (Dokumen)	8	112.637.000	8	411.235.000	8	452.358.500	8	497.594.350	8	547.353.785	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
4	Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah SOP dan Penerapannya (Dokumen)	1	105.764.000	1	242.863.500	1	267.149.850	1	293.864.835	1	323.251.319	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
19	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Persentase RPP siap lelang yang selesai ditangani ULP	90	2.337.898.000	92	5.034.568.000	94	5.538.024.800	96	6.091.827.280	98	6.701.010.008	
		Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan Barang dan Jasa	80		80		80		80		80		
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan ULP	Jumlah Waktu Layanan Pengadaan oleh ULP (Bulan)	12	1.927.350.000	12	3.540.240.000	12	3.894.264.000	12	4.283.690.400	12	4.712.059.440	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
2	Peningkatan Pembinaan Pengadaan barang dan jasa	Frekuensi Pelatihan / Pembinaan / bimtek / Pendampingan (kali)	3	183.145.000	3	495.429.000	3	544.971.900	3	599.469.090	3	659.415.999	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur,

													Pangkalpinang
3	Peningkatan pelayanan perencanaan Pengadaan barang dan jasa	Jumlah Pendampingan dan Monev Pengadaan (Kali)	2	111.378.000	2	404.888.000	2	445.376.800	2	489.914.480	2	538.905.928	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Timur, Pangkalpinang
4	Pencegahan dan Penanganan Pengaduan	Jumlah Sosialisasi (kali)	2	116.025.000	2	594.011.000	2	653.412.100	2	718.753.310	2	790.628.641	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Timur, Pangkalpinang
20	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Penggunaan e - Procrument terhadap belanja pengadaan	90	2.539.128.000	92	5.020.020.500	94	5.522.022.550	96	6.074.224.805	98	6.681.647.286	
		Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan secara elektronik	80		80		80		80		80		
1	Peningkatan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Bulan Layanan oleh LPSE (Bulan)	12	1.195.925.000	12	2.116.136.000	12	2.327.749.600	12	2.560.524.560	12	2.816.577.016	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
2	Peningkatan Layanan dan Dukungan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Penerapan aplikasi pendukung SPSE (Aplikasi)	2	459.493.000	2	962.824.500	2	1.059.106.950	2	1.165.017.645	2	1.281.519.410	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka

													a Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpina ng
3	Peningkatan Pelayanan dan Registrasi dan Verifikasi	Jumlah Penerapan aplikasi Penyedia Barang/Jasa (Aplikasi)	1	308.280.000	1	781.825.000	1	860.007.500	1	946.008.250	1	1.040.609.0 75	Luar Daerah,Provi nsi, SKPD, Bangka Barat,Bangk a Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpina ng
4	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Bulan Pemeliharaan Jaringan & Perangkat SPSE (Bulan)	12	575.430.000	12	1.159.235.0 00	12	1.275.158.5 00	12	1.402.674.3 50	12	1.542.941.7 85	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
21	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisis Jabatan	Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran kelembagaannya	70	2.047.186.5 25	75	952.670.000	80	1.067.670.0 00	85	1.137.670.0 00	90	1.262.670.0 00	
		Persentase ASN memahami dan mengimplementa sikan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan dan standar kompetensi teknis	75		80		85		90		95		
		Persentase jumlah pejabat struktural ASN	75		80		85		90		95		

		yang memahami dan mengimplementasikan uraian tugas dan fungsi											
		Persentase jumlah OPD provinsi, kabupaten, kota yang efektif dan efisien	70		75		80		85		90		
1	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen pembinaan 40 PD di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung (Dokumen)	1	81.146.000	1	132.670.000	1	142.670.000	1	152.670.000	1	162.670.000	Provinsi
2	Pembinaan uraian tugas perangkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terwujudnya pembinaan uraian tugas perangkat daerah di provinsi kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (%)	85	133.810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Provinsi
3	Pembinaan kelembagaan UPTD/UPTB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan pembinaan kelembagaan (dokumen)	1	74.827.500	1	160.000.000	1	180.000.000	1	190.000.000	1	220.000.000	Provinsi
4	Sinkronisasi fasilitasi penataan kelembagaan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sinkronisasi program dan kegiatan kelembagaan Provinsi, Kabupaten dan Kota se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan PP 18 Tahun 2016 tentang	0	87.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Provinsi

		Perangkat Daerah ()											
5	Penyusunan Rumpun Jabatan Fungsional umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016	tersusunnya buku rumpun jabatan fungsional Pemprop. Kep Babel (buku)	50	170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Pangkalpinang
6	Pembinaan kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan pembinaan (Dokumen)	1	83.475.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	180.000.000	1	200.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
7	penyusunan profil aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tersusunnya buku profil aparatur sipil negara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (%)	87	89.765.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Pangkalpinang
8	Evaluasi jabatan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen evaluasi jabatan (Dokumen)	1	74.751.945	1	160.000.000	1	170.000.000	1	200.000.000	1	240.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang

9	Bimbingan teknis penyusunan standar kompetensi teknis Pegawai Negeri Sipil pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terlaksananya standarisasi kompetensi teknis PNS pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung (buku)	50	243.553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Provinsi
10	Penyusunan standar kompetensi teknis Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen standar kompetensi teknis (Dokumen)	1	113.207.580	1	130.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000	1	200.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
11	Validasi Analisis Beban Kerja Jabatan Aparatur Sipil negara pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Kompilasi analisis beban kerja jabatan PNS pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur (buku)	50	201.805.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Provinsi
12	Validasi dan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Kompilasi hasil penetapan evaluasi jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	50	233.510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Provinsi

		yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur (buku)											
13	Pembinaan dan analisa jabatan dan beban kerja	Jumlah dokumen Anjab dan ABK (dokumen)	2	195.087.500	2	220.000.000	2	230.000.000	2	235.000.000	2	240.000.000	Provinsi
14	Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum dan Fungsional tertentu Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terlaksananya Penyusunan Jabatan Fungsional Umum dan fungsional tertentu di Pemerintah Provinsi Kep.Bangka Belitung (%)	100	265.008.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Provinsi
22	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan pengembangan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah	70	2.868.168.893	75	4.115.000.000	80	3.922.000.000	85	4.285.000.000	90	4.720.000.000	
		Persentase peningkatan informasi data profil aparatur jabatan struktural propinsi kepulauan bangka belitung	65		70		75		80		85		
		Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	63		65		67		70		75		
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN	96		97		99		99,5		100		
1	Penyusunan Profil Aparatur jabatan struktural	Tersusunnya laporan profil aparatur (laporan)	1	115.000.000	1	145.000.000	1	165.000.000	1	185.000.000	1	225.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Pangkalpinang

2	Forum Sekretaris Daerah Prov.babel	jumlah dokumen kesepakatan (Dokumen)	1	50.241.497	1	175.000.000	1	185.000.000	1	195.000.000	1	215.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
3	Pembinaan dan Evaluasi Profil Aparatur UPT Pemprov Babel	laporan pembinaan dan evaluasi profil aparatur UPT (laporan)	1	33.615.875	1	145.000.000	1	175.000.000	1	195.000.000	1	245.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
4	Pengadaan aplikasi e-Sakip/penerapan aplikasi e-Sakip	Jumlah aplikasi/jumlah peserta (unit/orang)	1	150.000.000	45	175.000.000	45	175.000.000	45	175.000.000	45	175.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
5	Bimbingan Teknis penyusunan Laporan kinerja, perjanjian kinerja dan rencana aksi kinerja di	Jumlah peserta (orang)	50	67.424.000	50	215.000.000	50	225.000.000	50	250.000.000	50	275.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangk

	Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung												<i>a Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang</i>
6	Pembinaan laporan kinerja	Kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kabupaten/kota)	7	175.000.000	7	200.000.000	7	225.000.000	7	255.000.000	7	250.000.000	<i>Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang</i>
7	Bimbingan teknis E-LHKPN	Jumlah peserta (orang)	50	106.301.000	50	165.000.000	50	187.000.000	50	205.000.000	50	220.000.000	<i>Luar Daerah, Provinsi, SKPD</i>
8	Pembangunan zona integritas	Jumlah laporan (laporan)	1	125.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	195.000.000	1	225.000.000	<i>Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang</i>
9	Rapat koordinasi evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah	Jumlah dokumen hasil/kesepakatan rakor (dokumen)	1	127.570.000	1	200.000.000	1	220.000.000	1	245.000.000	1	270.000.000	<i>Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka</i>

													<i>Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang</i>
10	Bimbingan teknis pengisian LHKPN	Jumlah peserta bimtek (wajib lapor LHKPN)	259	112.500.000	259	175.000.000	259	180.000.000	259	195.000.000	259	250.000.000	<i>Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang</i>
11	Penyusunan laporan kinerja tahunan dan perjanjian kinerja tahunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan kinerja dan perjanjian kinerja tahunan (Dokumen)	1	75.331.000	1	175.000.000	1	225.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000	<i>Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang</i>
12	Penyusunan pedoman indikator kinerja utama	Jumlah buku pedoman indikator kinerja utama provinsi (buku)	50	225.000.000	50	250.000.000	0	0	0	0	0	0	<i>Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur,</i>

													Pangkalpinang
13	Penyusunan Pedoman Pengembangan Penerapan Budaya Kerja ASN	Jumlah rakor, bimbingan teknis dan pergub pedoman penerapan budaya kerja ASN dan Monev (laporan/ pergub/ buku)	1	250.000.000	1	270.000.000	50	275.000.000	1	295.000.000	1	315.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
14	Rakor pencapaian indikator kinerja utama	Jumlah laporan capaian realisasi IKU (laporan)	1	125.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	195.000.000	1	225.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
15	Penyusunan database capaian kinerja individu	Jumlah laporan (laporan)	1	225.000.000	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang

16	Penyusunan standar capaian kinerja individu ASN	Jumlah buku, bimbingan teknis dan pergub standar capaian kinerja ASN dan monev (laporan/ pergub/ buku)	0	250.000.000	0	270.000.000	0	275.000.000	0	295.000.000	0	315.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
17	Penyusunan standar reward capaian kinerja individu dan perangkat daerah	Rakor, bimbingan teknis dan pergub reward dan capaian kinerja PD dan monev (laporan/ pergub/ buku)	0	250.000.000	0	270.000.000	0	275.000.000	0	295.000.000	0	315.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
18	Pembinaan standar manajemen mutu pada OPD, Cabdin dan UPT di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung	Jumlah laporan (laporan)	1	63.309.781	1	270.000.000	1	275.000.000	1	295.000.000	1	315.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
19	Forum Staf Ahli Kepala Daerah	Rakor dan laporan (laporan)	1	175.000.000	1	185.000.000	1	195.000.000	1	225.000.000	1	250.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangk

													<i>a Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpina ng</i>
20	Pembinaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Jumlah laporan (laporan)	1	72.140.240	1	120.000.000	1	140.000.000	1	155.000.000	1	170.000.000	<i>Luar Daerah,Provi nsi, SKPD, Bangka Barat,Bangk a Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpina ng</i>
21	Bimbingan teknis penyusunan capaian kinerja individu ASN di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung	Jumlah peserta (orang)	43	94.735.500	43	160.000.000	43	175.000.000	43	185.000.000	43	190.000.000	<i>Luar Daerah,Provi nsi, SKPD, Bangka Barat,Bangk a Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpina ng</i>

23	Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Peningkatan kepuasan masyarakat	0	852.840.935	0	1.900.000.000	0	2.035.000.000	0	2.220.000.000	0	2.355.000.000	
		Peningkatan kinerja sumber daya aparatur	50		55		60		65		70		
1	Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan pembinaan pelaksanaan SOP (laporan)	1	85.119.480	1	170.000.000	1	190.000.000	1	210.000.000	1	230.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
2	Pembinaan pelaksanaan pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Laporan pembinaan pelaksanaan pelayanan publik (Dokumen)	1	48.999.680	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
3	Rapat koordinasi Biro/Bagian Organisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dokumen kesepakatan Biro/Bagian Organisasi (Dokumen)	1	88.991.825	1	170.000.000	1	190.000.000	1	210.000.000	1	230.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur,

													Pangkalpinang
4	Peningkatan administrasi ketatausahaan	Jumlah laporanvdukungan data perencanaan, pelaporan dan ketatausahaan (laporan)	1	72.493.150	1	285.000.000	1	300.000.000	1	325.000.000	1	350.000.000	Luar Daerah,Provinsi, SKPD, Bangka Barat,Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
5	Bimtek penyusunan proposal dan pelatihan admin kompetisi inovasi pelayanan publik	Jumlah Kegiatan Bimtek (Kegiatan)	1	97.924.275	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	Luar Daerah,Provinsi, SKPD, Bangka Barat,Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
6	Audit Surveillance ISO 9001:2008 menuju Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Samsat Sungailiat dan UPTSP	Ketetapan atas ISO 9001 : 2008 (Dokumen)	1	149.319.550	1	200.000.000	1	200.000.000	1	230.000.000	1	250.000.000	Luar Daerah,Provinsi, SKPD, Bangka Barat,Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang

7	Peningkatan Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan RB (dokumen)	1	100.324.275	1	200.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	270.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
8	Roadmap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen roadmap pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	123.155.325	1	275.000.000	1	290.000.000	1	320.000.000	1	340.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
9	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Jumlah dokumen terkait kepuasan masyarakat (dokumen)	1	86.513.375	1	150.000.000	1	165.000.000	1	175.000.000	1	185.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
24	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi,	Persentase pemanfaatan media dan IT untuk layanan	80	2.193.142.400	85	3.503.023.340	90	4.020.448.841	95	4.615.086.767	100	5.298.498.912	

	Publikasi Media dan IT	kehumasan, dokumentasi dan publikasi											
1	Publikasi Media Massa / Cetak	Jumlah publikasi di media massa/cetak (Tayang)	154	1.467.700.000	254	2.242.500.000	292	2.578.875.000	336	2.965.706.250	386	3.410.562.187	Provinsi, SKPD
2	Publikasi Media Elektronik/IT	Jumlah publikasi di media elektronik dan IT (Tayang)	105	299.942.025	155	458.425.765	178	527.189.630	205	606.268.074	236	697.208.285	Provinsi, SKPD
3	Pendokumentasian dan Belanja Spanduk/Baleho	Jumlah publikasi media luar (Tayang)	27	163.901.900	40	260.899.580	45	300.034.517	50	345.039.695	55	396.795.649	Provinsi, SKPD
4	Penerbitan Majalah / Buletin Pemerintah Provinsi	Jumlah Terbitan Majalah/Buletin Pemerintah Provinsi (Eksemplar)	4.200	241.827.425	5.520	378.407.385	6.348	435.168.492	7.300	500.443.767	8.395	575.510.332	Provinsi, SKPD
5	Media Gathering	Jumlah peserta media gathering dari media lokal dan nasional (Orang)	0	0	35	52.195.000	40	60.024.250	45	69.027.887	50	79.382.071	Provinsi, SKPD
6	Workshop Humas Bidang Media Elektronik dan IT	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang Media Elektronik dan IT (Orang)	10	19.771.050	12	30.315.610	15	34.862.952	17	40.092.394	20	46.106.253	Provinsi, SKPD
7	Workshop Bidang Kehumasan	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang Kehumasan (Orang)	0	0	50	80.280.000	55	84.294.000	55	88.508.700	60	92.934.135	Provinsi, SKPD
25	Program Peningkatan Pelayanan Protokol	Persentase agenda kepala daerah yang terlayani	80	162.698.250	85	535.354.305	90	585.657.450	95	708.006.069	100	814.206.978	
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (Bulan)	4.550	66.562.500	5.232	78.846.875	6.017	90.673.906	6.920	104.274.992	7.958	119.916.241	Provinsi, SKPD

2	Workshop Bidang Keprotokolan	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang keprotokolan (Orang)	60	96.135.750	70	221.802.225	80	225.072.558	90	293.333.443	100	337.333.459	Provinsi, SKPD
3	Layanan Tamu Pemerintah dan Negara	Jumlah layanan tamu pemerintah dan negara (Orang)	375	0	431	84.705.205	496	97.410.986	569	112.022.634	655	128.826.028	Provinsi, SKPD
4	Peningkatan Fungsi Keprotokolan	Tersedianya IT untuk keprotokolan (Aplikasi)	0	0	1	150.000.000	1	172.500.000	1	198.375.000	1	228.131.250	Provinsi, SKPD
26	Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi	Persentase Pelayanan dan Penyampaian informasi kepada aparatur dan publik	80	1.224.371.325	85	1.975.838.255	90	2.272.213.993	95	2.613.046.093	100	3.005.003.007	
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk aparatur di sekretariat daerah (Eksemplar)	17.728	183.992.200	27.171	285.174.930	31.247	327.951.170	35.934	377.143.846	41.324	433.715.423	Provinsi, SKPD
2	Pengumpulan, Penyaringan informasi dan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan Luar Daerah di rubah menjadi Pengumpulan Informasi, Layanan Kehumasan, dan keprotokolan	Frekuensi Layanan Publikasi dan Keprotokolan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan luar Daerah (kali)	179	259.830.650	288	396.076.330	331	455.487.780	381	523.810.947	438	602.382.589	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
3	Penguatan Fungsi Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Ketersediaan informasi dan dokumentasi yang bisa diakses publik (PD)	21	230.918.550	25	362.861.110	30	417.290.276	35	479.883.818	42	551.866.390	Provinsi, SKPD

4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan keprotokolan	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan Keprotokolan (Buah)	4.000	533.821.375	6.277	792.152.775	7.218	910.975.691	8.301	1.047.622.044	9.546	1.204.765.351	Provinsi, SKPD
5	Peningkatan Kualitas SDM dan Koordinasi Kehumasan dan Keprotokolan	Jumlah SDM yang mengikuti kursus/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi di luar daerah (Orang)	2	15.808.550	6	39.573.110	8	45.509.076	10	52.335.438	12	60.185.754	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
6	Penyediaan Pakaian Khusus Lapangan Humas dan Protokol	Jumlah pakaian khusus lapangan (Stel)	0	0	55	100.000.000	63	115.000.000	73	132.250.000	84	152.087.500	Provinsi, SKPD

Tabel VII.1
Indikator Kinerja Sekeretariat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA SETDA	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TUJUAN 1								
1	1. Meningkatkan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan publik yang tepat 2. Meningkatkan pengkoordinasian administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah yang efisien dan tepat 3. Meningkatkan jumlah pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 4. Meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilihan kepala daerah dan legislatif (BIRO PEMERINTAHAN)	N.A	70%	75%	80%	85%)	90%	90%
2	Nilai rata-rata kepuasan masyarakat (BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT)	N.A	70%	73%	75%	76%	80%	80%

3	Persentase kebijakan di bidang produk hukum, pelayanan hukum dan dokumentasi informasi (BIRO HUKUM)	N.A	80%	83%	85%	90%	95%	95%
4	Persentase arah kebijakan perekonomian yang berkualitas (BIRO PEREKONOMIAN)	N.A	70%	75%	80%	85%	85%	85%
5	Persentase nilai akuntabilitas pengendalian pembangunan (BIRO PEMBANGUNAN)	N.A	60%	65%	70%	75%	80%	80%
6	Persentase kematangan kinerja pengadaan barang atau jasa yang memenuhi kondisi timeless (ketepatan waktu), cost saving (penghematan biaya), kwaliti atau kualitas baik dan kepuasan layanan atau IKM (BIRO LAYANAN PENGADAAN)	N.A	3	1	1	1	1	1
7	Nilai RB Provinsi meningkat (BIRO ORGANISASI)	N.A	4 Kebijakan	1 Kebijakan	0	0	0	0
8	Persentase informasi kehumasan yang terpublikasi dan Persentase kepuasan keprotokolan (BIRO HUMAS PROTOKOL)	N.A	80%	85%	90%	95%	100%	100%
9	Tingkat kepuasan pelayanan umum dan kesekretariatan Setda (BIRO UMUM)	N.A	6	6	6	6	6	6

TUJUAN 2								
1	Persentase koordinasi yang dilaksanakan (BIRO PEMERINTAHAN)	N.A	70%	75%	80%	85%)	90%	90%
2	persentase koordinasi yang dilaksanakan (BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT)	N.A	81%	83%	85%	90%	95%	95%
3	persentase koordinasi yang dilaksanakan (BIRO HUKUM)	N.A	80%	83%	85%	90%	95%	95%
4	persentase koordinasi yang dilaksanakan (BIRO PEREKONOMIAN)	N.A	70%	75%	80%	85%	90%	90%
5	persentasi rekomendasi yang disepakati (BIRO PEMBANGUNAN)	N.A	60%	70%	80%	90%	100%	100%
6	persentase kondisi kematangan kinerja pengadaan barang/jasa dan pengadaan secara elektronik yang memenuhi kriteria timeless (tepat waktu). (BIRO LAYANAN PENGADAAN)	N.A	75%	80%	85%	90%	95%	95%
7	presentase kondisi kematangan kinerja pengadaan barang/jasa dan pengadaan secara elektronik yang memenuhi kriteria cost saving (penghematan biaya) (BIRO LAYANAN PENGADAAN)	N.A	10%	8%	6%	4%	2%	2%

8	prosentase kondisi kematangan kinerja pengadaan barang/jasa yang memenuhi kriteria Quality (kualitas baik) (BIRO LAYANAN PENGADAAN)	N.A	70%	75%	80%	85%	90%	90%
9	prosentase kondisi kematangan kinerja pengadaan barang/jasa dan pengadaan secara elektronik yang memenuhi kepuasan layanan. (BIRO LAYANAN PENGADAAN)	N.A	75%	80%	85%	90%	95%	95%
10	nilai peningkatan indeks kepuasan masyarakat (BIRO ORGANISASI)	N.A	C	C	C	B	B	B
11	nilai kinerja Sekretariat Daerah yang Baik (BIRO ORGANISASI)	N.A	B	B	B	A	A	A
12	Persentase Pegawai yang memiliki kinerja baik (BIRO ORGANISASI)	N.A	76%	78%	80%	83%	86%	86%
13	persentase koordinasi kehumasan dan keprotokolan yang efektif (BIRO HUMAS PROTOKOL)	N.A	80%	83%	85%	90%	95%	95%
14	Persentase Peningkatan pelayanan pemerintahan (BIRO UMUM)	N.A	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel VII.2

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022
Sesuai dengan Rencana Strategis

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
1	a. Meningkatnya kualitas dan jumlah kebijakan dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama	a. Persentase urusan dalam LPPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki capaian kinerja dengan predikat tinggi	Selaras dengan visi dan Misi Kepala daerah	jumlah LPPD dengan predikat tinggi dibandingkan dengan Jumlah LPPD Kabupaten/Kota yang masuk	PP nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyusunan LKPJ/LPPD. BIRO PEMERINTAHAN	Program:	
	b. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama	b. meningkatnya kuantitas penyelenggaraan urusan/kewenangan yang dilaksanakan pemerintah provinsi				1. PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	
	c. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat	c. terlaksananya pelayanan administrasi dan penyediaan dokumen bagi pemerintah daerah				Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung - Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah antar Kab/Kota Prov. Kep. Bangka Belitung - Inventarisasi Pendataan, Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupabumi (Unsur Buatan) - Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah 	

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
	daerah yang efisien dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama					- Percepatan dan Pemasangan Pilar Batas Daerah antar Kab/Kota di Prov. Kep. Bangka Belitung	
d.	Meningkatnya partisipasi publik dalam berdemokrasi dan berpolitik serta kebebasan menyampaikan pendapat/aspirasi					- Pengadaan Lahan 2. PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH Kegiatan: - Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) - Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir - Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kab/Kota di Prov. Kep. Bangka Belitung - Sinkronisasi Penyelenggaraan	

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
						Urusan/Kewenangan di Prov. Kep. Bangka Belitung - Koordinasi Penerapan Pelaksanaan NSPk di Prov. Kep. Bangka - Workshop Penataan dan Optimalisasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Prov. Kep. Bangka Belitung - Pelayanan Perizinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Ketua/Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung ke Luar Negeri - Peresmian, Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan KDH dan WKDH 3. PROGRAM PENGEMBANGAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH Kegiatan:	

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
						<ul style="list-style-type: none"> - Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan/Kewenangan di Prov. Kep. Bangka Belitung - Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakernas APPSI - Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan - Pengembangan Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama - Inventarisasi Potensi Kerjasama - Penyelarasan Program Pemerintah Daerah dan Pusat 	

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
2	<p>a. Meningkatnya pelayanan publik dibidang keagamaan</p> <p>b. Meningkatnya pelayanan publik kepada penerima hibah dan bansos</p> <p>c. Meningkatnya pelayanan di bidang pendidikan KB, pemuda dan Pariwisata</p>	<p>persentase kebijakan yang disusun</p> <p>Persentase fasilitasi yang disalurkan</p>	<p>Dalam rangka mendukung pencapaian kesejahteraan rakyat diperlukan kebijakan dan fasilitasi kesejahteraan rakyat yang tepat sasaran</p>	<p>jumlah kebijakan yang disusun dibandingkan dengan kebijakan yang direncanakan dikali 100%</p> <p>Jumlah yang mendapat fasilitasi dibandingkan jumlah yang mengajukan bantuan kali 100%</p>	Biro Kesra	<p>Program :</p> <p>1. PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KEAGAMAAN</p> <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan Trasportasi domestik jemaah haji - Meningkatnya Pembinaan Mental dan Spritual kepada Masyarakat Prov. Kep. Babel - Peningkatan Kehidupan Beragama pada bulan ramadhan - Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulanagn Jemaah Haji - Pendampinangan Jemaah Haji Prov. Kep. Babel <p>2. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN HIBAH DAN BANSOS</p> <p>Kegiatan:</p>	

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
						<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi dan Analisis Proposal Hibah - Monitoring Hibah - Evaluasi dan Analisis Proposal bantuan Sosial - Monitoring Bantuan Sosial - Peningkatan Koordiansi Kebijakan Sosial,Kesehatan,Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Rapat Koordinasi Bidang Bantuan Sosial dan Hibah - Sosialisasi Bantuan Sosial dan Hibah <p>3. PROGRAM PENINGKATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI BIDANG PENDIDIKAN KB, PEMUDA DAN PARIWISATA</p> <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagian Pendidikan dan Kebudayaan 	

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
						<ul style="list-style-type: none"> - Rakor Bidang Pendidikan dan Kebudayaan - Bagian Pemberdayaan Permepuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana - Bagian Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga - Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Kegiatan:Rapat Koordiansi Bidang KB - Pembinaan TP UKS - Musyawarah Tokoh Adat Seni dan Budaya - Rapat Koordnasi Bidang Pemberdayaan Permepuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana - Rapat koordinasi dan Kebijakan bidang 	

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
						Pariwisata Pemuda dan Olahraga - Pelaksanaan Pospenas dan Pospeda - Kegiatan: Rapat koordinasi Bidang Perlindungan Anak	
3	Meningkatnya penyusunan kebijakan di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum	1. Persentase kualitas dan kuantitas produk hukum 2. Persentase Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah 3. Persentase Publikasi Produk hukum	Dalam rangka peningkatan penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan legal drafting dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Jumlah Kuantitas Produk Hukum Daerah 2. Jumlah penyelesaian sengketa 3. Jumlah produk hukum yang dipublikasikan	Biro Hukum	1. PROGRAM PENINGKATAN PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Kegiatan: - Penyusunan Propem Perda dan Rancangan Peraturan Daerah - Penyusunan Produk Hukum Daerah - Penyusunan Naskah Hukum lainnya - Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. PROGRAM PENINGKATAN	

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
						PELAYANAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Perdata antara Pemda dgn Org/masy secara litigasi atau non litigasi - Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda - Pembinaan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa akibat Pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Pemda di Kab/kota Provinsi Kep. Babel - Pembinaan Pelaksanaan RANHAM di Kab/kota Prov. kep. Babel - Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin oleh Lembaga Bankum Prov. Kep. Babel 	

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
						- Penyuluhan Hukum di 7 Kabupaten/kota 3. PROGRAM PENGEMBANGAN DOKUMENTASI HUKUM DAN INFORMASI HUKUM Kegiatan: - Pengelolaan dan Pengembangan JDIH - Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kab/kota se Provinsi Kep. Bangka Belitung - Penyusunan Katalog Perda dan Pergub dan Kompilasi Perda dan Pergub Indikator	
4	Meningkatnya rekomendasi kebijakan di bidang sumber daya alam	Persentase rekomendasi kebijakan terkait sumber daya alam	Peran Biro Perkonomian dalam penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi	Jumlah rekomendasi yang telah disusun dibandingkan jumlah rekomendasi yang akan disusun di kali 100%	Biro Perekonomian	Program : 1. PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI BUMD , PENANAMAN MODAL, PARIWISATA DAN BUDAYA	

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
						Kegiatan : - Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung - Sinkronisasi Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSPL) - Pembinaan dan Tata Kelola BUMD se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Kajian Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Analisa Kajian Investasi Daerah - Kajian Strategis Destinasi Wisata di Provinsi Bangka Belitung - Pelestarian Benda Cagar Budaya atau diduga Benda Cagar Budaya di Provinsi Bangka Belitung	

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
						2. PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM Kegiatan: - Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan gas Sasaran - Identifikasi Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Bukan Logam - Pengembangan Potensi Energi Baru dan Terbarukan - Pengembangan Potensi Produksi Pertanian, Perkebunan dan Komoditi Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Pengembangan Potensi Produksi Hasil Kelautan dan Perikanan	

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
						<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan dan Penataan Lahan Kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Pemberdayaan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Dampak Lingkungan Hidup Perusahaan <p>3. PROGRAM</p> <p>PENINGKATAN</p> <p>KOORDINASI</p> <p>KEBIJAKAN</p> <p>PEREKONOMIAN</p> <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Prov.Kep.Babel - Analisa Permasalahan Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 	

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
						<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Daerah - Sinkronisasi Promosi Potensi Daerah Terpadu Dalam dan Luar Negeri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Kerjasama IMT-GT Regional Sumatera dan Sekretariat IMT-GT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Pelayanan Administrasi Tata Usaha Sasaran: Terlayaninya Aparatur Sipil Negara Biro Perekonomian - Sinkronisasi Sistem Resi Gudang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Sinkronisasi dan Pemantauan Pertumbuhan Koperasi dan UMKM di 	

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
						Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Sinkronisasi Perindustrian Hulu dan Hilir di Prov.Kep.Babel - Peningkatan Perdagangan dalam dan Luar Negeri di Prov.Kep.Babel	
5	Meningkatnya fasilitasi pengendalian kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan	Persentase fasilitasi kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan yang termanfaatkan	Sebagai instrumen pengendalian pembangunan	Jumlah kebijakan Pengendalian pembangunan yang disusun dibandingkan dengan Jumlah kebijakan yang seharusnya disusun kali 100%	E-monev Tepra BIRO PEMBANGUNAN	Program : 1. PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan: - Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota - Peningkatan Pengendalian Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN APBD Kegiatan:	

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
						<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Fungsi sistem e-monev APBD - Kebijakan Monitoring Evaluasi APBD - Peningkatan Capaian Realisasi APBD - Peningkatan Fungsi Sismonteptra APBD Provinsi Kabupaten/Kota <p>3. PROGRAM PERENCANAAN SETDA</p> <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah - Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat Daerah - Pengintegrasian Sistem Informasi Data <p>4. PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN APBN</p> <p>Kegiatan :</p>	

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
						<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sistem e-monev APBN - Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan yang bersumber dari APBN - Koordinasi Kebijakan APBN 	
6	Terciptanya pengadaan barang atau jasa yang transparan, akuntabel, terbuka dan kompetitif	Persentase belanja pengadaan melalui e-procurement	Sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Jumlah kebijakan yang telah disusun	Biro Layanan Pengadaan	<p>Program :</p> <p>1. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI LAYANAN PENGADAAN</p> <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Penerapan Data Informasi layanan - Pengelolaan Data Informasi - Peningkatan Layanan Publik - Peningkatan administrasi Ketatausahaan <p>2. PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN</p>	

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
						<p>PENGADAAN BARANG DAN JASA</p> <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa - Peningkatan Pelayanan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa - Peningkatan Fungsi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa - Pencegahan dan Penanganan Pengaduan <p>3. PROGRAM</p> <p>PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Layanan dan Dukungan Pengadaan Secara Elektronik - Pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik 	

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
						<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Fungsi Pengelolaan LPSE - Peningkatan Pelayanan dan Registrasi dan Verifikasi 	
7	Meningkatnya penyusunan kebijakan dibidang kelembagaan, tata laksana, analisis jabatan dan kepegawaian , administrasi pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi	Jumlah Kebijakan kelembagaan dan analisa jabatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Peran Biro Organisasi dalam menyusun Kebijakan Kelembagaan tatalaksana, analisa jabatan dan kepegawaian	Jumlah Regulasi Kelembagaan dan analisa jabatan yang disahkan Jumlah Kebijakan terkait peningkatan kiner	Tupoksi	Program : 1. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN SERTA ANALISIS JABATAN 2. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN TATA LAKSANA PEMERINTAH DAERAH 3. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH Kegiatan : 1. Evaluasi Kelembagaan Perangkat daerah	

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
						Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Pembinaan dan Analisa Jabatan dan Beban Kerja	
8	1. Meningkatnya informasi kehumasan yang diterima oleh publik 2. Meningkatnya agenda pimpinan daerah yang terlayani	persentase kebijakan pelayanan publik yang dicapai	Sebagai sarana transparansi publik	Jumlah kebijakan pelayanan publik yang dilaksanakan dibandingkan target renstra	Biro Humas Protokol	Program : 1. . PROGRAM PENINGKATAN PUBLIKASI, PENGUMPULAN DAN PENYARINGAN INFORMASI 2. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN, DOKUMENTASI, PUBLIKASI MEDIA DAN IT 3. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PROTOKOLER Kegiatan :	

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
						1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2. Pengumpulan, Penyaringan Informasi dan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan Luar Daerah	
9	1. Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan 2. Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan 3. Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang keuangan	1. Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan 2. Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan 3. Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang keuangan	Untuk mendukung kinerja penyelenggara pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan yang disusun	Biro Umum	Program : 1. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN Kegiatan : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
10	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan, dan kerjasama	Persentase koordinasi yang dilaksanakan	Selaras dengan visi dan Misi Kepala daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah koordinasi yang akan dilaksanakan	Rekomendasi Rakorgub dan Bupati Walikota se provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Program : 1. PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 2. PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH 3. PROGRAM PENGEMBANGAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH Kegiatan : 1. Koordinasi Penyusunan LKPJ 2. Rapat Koordinasi Gubernur dan Walikota/Bupati 3. Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan urusan/kewenangan Kebijakan otonomi daerah di Pro. Kep.Babel	

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
11	Meningkatnya koordinasi dibidang kesejahteraan rakyat	persentase koordinasi yang dilaksanakan	Dalam rangka mendukung pencapaian kesejahteraan rakyat diperlukan kebijakan dan fasilitasi kesejahteraan rakyat yang tepat sasaran	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dibandingkan jumlah koordinasi yang direncanakan kali 100%	Biro Kesra	Program : 1. PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KEAGAMAAN 2. PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, DAN PEMUDA 3. PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SOSIAL, KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kegiatan : 1. Rapat Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Monitoring Evaluasi dan bantuan Sosial Hibah	

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
						3. Evaluasi dan Analisis Proposal Bansos dan Hibah	
12	Meningkatnya koordinasi di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum	persentase koordinasi yang dilaksanakan	Dalam upaya peningkatan kualitas produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah koordinasi / pembinaan yang dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah koordinasi/pembinaan yang direncanakan kali 100%	Biro Hukum	Program : 1. PROGRAM PENINGKATAN PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH 3. PROGRAM PENGEMBANGAN DOKUMENTASI HUKUM DAN INFORMASI HUKUM Kegiatan : 1. Rapat Koordinasi JDIH Provinsi Kab/Kota se Prov. Kep. Bangka Belitung	

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
						2. Rakor biro hukum dan bagian hukum Kab/Kota seProv. Kep. Bangka Belitung 3. Rapat Koordinasi Program Pembentukan Peraturan Daerah	
13	Meningkatnya koordinasi dibidang administrasi perekonomian	persentase koordinasi yang dilaksanakan	Peran Biro Perekonomian dalam melaksanakan koordinasi dan evaluasi di bidang ekonomi	Jumlah koordinasi perekonomian yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah koordinasi perekonomian yang akan dilaksanakan kali 100%	Biro Perekonomian	Program : 1. PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI BUMD , PENANAMAN MODAL, PARIWISATA DAN BUDAYA 2. PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM 3. PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEREKONOMIAN Kegiatan :	

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
						1. Koordinasi, monitoring dan evaluasi distribusi bahan baku minyak dan gas di prov. Kep. Bangka Belitung 2. Koordinasi, Monev Tim Pengendalian inflasi Daerah (TPID)serta penguatan kerjasama di Prov. Kep. Bangka Belitung 3. Koordinasi program CSR	
14	Meningkatnya koordinasi dibidang pembangunan daerah	Persentase koordinasi yang akan dilaksanakan	Sebagai instrumen pengendalian pembangunan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dibandingkan jumlah koordinasi yang direncanakan kali 100%	e-monev (TEPRA)	Program : 1. PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH 2. PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN APBD 3. PROGRAM PERENCANAAN SETDA 4. PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN APBN	

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
						Kegiatan : 1. Koordinasi Sistem e-Monev APBD 2. Koordinasi Penyempurnaan Aplikasi e-Monev APBD 3. Koordinasi Sinkronisasi Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota 4. Koordinasi Kebijakan APBN	
15	Meningkatnya pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pengadaan secara elektronik	persentase kondisi kematangan kinerja pengadaan barang/jasa dan pengadaan secara elektronik yang memenuhi kriteria timeless (tepat waktu)	Kriteria ini mencerminkan pelaksanaan pengadaan dilaksanakan tepat waktu sesuai perencanaan)	- Perbandingan antara tanggal akhir pekerjaan di Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan tanggal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan - Jumlah Pengadaan Tepat Waktu dibagi	Bulan Mei 2017 (77%) analisa BLP • Perkiraan tanggal selesai pekerjaan pada RUP (Rencana Umum Pengadaan) • Tanggal aktual selesai	Program : 1. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI LAYANAN PENGADAAN 2. PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 3. PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN	

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
				<p>Jumlah Pengadaan yang dilaksanakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semakin besar presentase, semakin baik kinerjanya • Baik: Pencapaian > 80 • Cukup: Pencapaian 70 – 80 • Kurang: Pencapaian < 70 	<p>pekerjaan (Tanggal ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan)</p>	<p>PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK</p> <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa 2. Peningkatan Pelayanan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 3. Peningkatan fungsi pelayanan ULP 	
		<p>persentase kondisi kematangan kinerja pengadaan barang/jasa dan pengadaan secara elektronik yang memenuhi kriteria cost</p>	<p>Kriteria ini mencerminkan ketepatan perhitungan Pagu dalam perencanaan.</p>	<p>- selisih pagu anggaran dengan pagu kontrak pertahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah paket yang dilelang berdasarkan Data LPSE • Jumlah Pagu Anggaran yang 		

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
		saving (penghematan biaya)	Skala normal harusnya nilai Pagu dengan nilai Kontrak atau nilai HPS dengan nilai Kontrak tidak mempunyai selisih terlalu besar selama Pagu ditentukan dengan perhitungan yang tepat saat menyusun perencanaan	- selisih pagu HPS dengan Pagu Kontrak pertahun - Semakin kecil nilai indeks, semakin baik kinerjanya (pagu telah disusun berdasarkan data dan informasi yang memadai)	dilelang berdasarkan Data LPSE • Jumlah HPS paket yang dilelang berdasarkan Data LPSE • Jumlah Nilai Kontrak paket yang dilelang (Data LPSE)		
		persentase kondisi kematangan kinerja pengadaan barang/jasa yang memenuhi kriteria Quality (kualitas baik)	a) Rencana jadwal pengadaan pada yang direncanakan selaras antara RUP dan rencana program kerja (RKA/DPA) / Tanggal awal pelaksanaan dan tanggal akhir pelaksanaan , keduanya harus	Jumlah paket pengadaan yang memiliki jadwal pengadaan yang selaras antara RUP dan rencana program kerja dibandingkan dengan jumlah paket pengadaan	• Rencana jadwal program kerja/kegiatan berdasarkan RUP • Rencana jadwal pengadaan berdasarkan RUP • Standar minimum		

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
			<p>sesuai antara RUP dan KAK</p> <p>b) RUP diterbitkan dalam waktu yang sesuai dengan standar dan benchmark / Membandingkan tanggal submission SIRUP per paket dengan benchmark/patokan yang ditentukan oleh Pimpinan Daerah</p>	<p>Jumlah paket pengadaan yang menerbitkan RUP pada tanggal yang sesuai dengan standar dan benchmark dibandingkan dengan jumlah paket pengadaan</p> <p>Semakin besar presentase, semakin baik kinerjanya</p> <p>Baik: Pencapaian > 80 Cukup: Pencapaian 70 – 80</p>	<p>untuk waktu dan jadwal sebagai acuan perencanaan pengadaan berdasarkan perka LKPP</p>		

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
				Kurang: Pencapaian < 70			
		persentase kondisi kematangan kinerja pengadaan barang/jasa dan pengadaan secara elektronik yang memenuhi kepuasan layanan.	<p>- Indikator ini mengukur persentasi pelanggan internal (seluruh OPD) dan pelanggan eksternal (penyedia barang/jasa) yang disurvei yang menyatakan kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh ULP.</p> <p>- Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan proses pengadaan dilaksanakan dengan</p>	<p>Jumlah pelanggan yang puas dibandingkan dengan jumlah pelanggan yang disurvei</p> <p>Semakin besar nilai indeks, semakin baik kinerjanya (menggambarkan kepuasan vendor terhadap kegiatan pengadaan BLP.</p> <p>• Baik: Pencapaian > 80 • Cukup: Pencapaian 70 – 80</p>	<p>• Rencana jadwal program kerja/kegiatan berdasarkan RUP</p> <p>• Rencana jadwal pengadaan berdasarkan RUP</p> <p>• Standar minimum untuk waktu dan jadwal sebagai acuan perencanaan pengadaan berdasarkan perka LKPP</p>		

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
			baik dan memenuhi ekspektasi pelanggan. Hal ini dapat berdampak pada komunikasi dan kolaborasi yang lebih efektif antar ULP dan pelanggan untuk menghasilkan outcome pengadaan yang lebih baik.	<ul style="list-style-type: none"> Kurang: Pencapaian < 70 			
16	Meningkatnya koordinasi dibidang kelembagaan, tata laksana, analisis jabatan dan kepegawaian, administrasi pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi	persentase peningkatan indeks kepuasan masyarakat	Biro Organisasi sebagai salah satu organisasi public yang juga dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, kepuasan pelayanan yang diberikan Biro organisasi menjadi salah satu tolok ukur	IKM = total nilai persepsi per unsur x nilai penimbang/total unsur yang terisi	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata nilai tingkat kepuasan Jumlah responden 	Program : 1. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN SERTA ANALISIS JABATAN 2. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN TATA LAKSANA PEMERINTAH DAERAH	

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
			keberhasilan kinerja Biro Organisasi			3. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH Kegiatan :	
		Nilai kinerja Sekretariat Daerah yang Baik	SAKIP Sekretariat Daerah akan berkontribusi terhadap SAKIP Provinsi	Sesuai dgn Permenpan petunjuk pelaksanaan evaluasi AKIP	Menpan RB	1. Bimtek penyusunan proposal dan pelatihan admin kompetisi inovasi pelayanan publik 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik 3. Audit Surveyance ISO 9001:2008 menuju sertifikasi ISO 9001:2015 untuk samsat sungailiat	
		Pelaksanaan nilai-nilai budaya kerja	Untuk meningkatkan kinerja ASN	Jumlah pegawai yang memiliki kinerja baik dibandingkan jumlah seluruh pegawai dikali 100%	ASN Pemprov Kepulauan Bangka Belitung		
17	Meningkatnya koordinasi kehumasan dan keprotokolan yang efektif	persentase koordinasi kehumasan dan keprotokolan yang efektif	Sebagai sarana transparansi publik	Jumlah koordinasi kehumasan dan keprotokolan yang dibandingkan target renstra	Biro Humas Protokol	Program : 1. PROGRAM PENINGKATAN PUBLIKASI, PENGUMPULAN DAN PENYARINGAN INFORMASI	

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
						2. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN, DOKUMENTASI, PUBLIKASI MEDIA DAN IT 3. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PROTOKOLER Kegiatan : 1. Publikasi Media Massa/Cetak 2. Publikasi Media Elektronik/ IT 3. Penerbitan Majalah/ Buletin Pemerintah Provinsi 4. Media Gathering 5. Workshop humas bidang media elektronik dan IT	

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan			Program/Kegiatan	Ket
			Urgensi	Formulasi	Sumber Data		
18	Meningkatnya koordinasi bidang rumah tangga , keuangan , dan aset setda	Persentase penerima layanan pemerintahan	Untuk mendukung kinerja penyelenggara pemerintah Daerah	Persentase koordinasi yang dilakukan dibandingkan dengan persentase koordinasi yang yang seharusnya dilakukan	Quesioner	Program : 1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kegiatan : 1. Peningkatan Disiplin Aparatur	